LTKL LINGKAR TEMU KABUPATEN LESTARI



9 Tahun, Kabupaten:

Menumbuhkan Perubahan Sistemik untuk Kabupaten Lestari

Laporan Dampak 2023-2026

9 Tahun, 9 Kabupaten: Menumbuhkan Perubahan Sistemik untuk Kabupaten Lestari

Laporan Dampak LTKL 2023-2026

Tim Editorial
Anastasya Firdauzi
Fara Devana
Indra Oktora
Rhema Wijaya
Ristika Putri Istanti

Desain dan Tata Letak
NStudio

Foto-foto
Lingkar Temu Kabupaten Lestari
Jejaring Mitra LTKL

Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari
Grha Tirtadi Lantai 3 no. 308
Jl. Pangeran Antasari No.18A
Cipete Selatan, Jakarta Selatan 12410

www.kabupatenlestari.org

Copyright © 2026

Hak cipta dilindungi Undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari

Daftar Isi

Daftar Istilah dan Singkatan 01

Kata Sambutan Bersama dari LTKL, Sekretariat LTKL, dan APKASI 03

Ringkasan Eksekutif 05

Sekilas Dampak 07

Konteks dan Kemajuan 09

Pendekatan LTKL 11

Peta Anggota LTKL 15

Jejak Gerak Kabupaten 17

Ruang Tumbuh dan Akuntabilitas Sekretariat 53

Daftar Istilah dan Singkatan

Agregator	Wadah yang melakukan proses pengumpulan atau pengintegrasian terpadu ke dalam satu tempat terpusat. Dalam konteks ini, biasa digunakan dalam usaha bisnis agar usaha-usaha di daerah dapat dikumpulkan atau dipadukan dalam satu tempat untuk membantu mereka memperluas pasar.
Agroforestri/ Wanatani	Sistem pengelolaan lahan yang menggabungkan penanaman pohon berkayu (tanaman hutan) dengan tanaman pertanian atau perkebunan pada area yang sama.
APL	Areal Penggunaan Lain adalah area di luar kawasan hutan negara yang sah untuk pembangunan non-kehutanan.
BNPB	Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah lembaga pemerintah non-kementerian di Indonesia yang bertugas mengurus penanggulangan bencana.
Ekonomi Restoratif	Suatu lanskap/yurisdiksi yang dikelola untuk kegiatan ekonomi (alokasi sumberdaya) secara terintegrasi dan efisien dengan tujuan menjaga dan merestorasi alam.
HTI	Hutan Tanaman Industri adalah kawasan hutan produksi yang sengaja ditanami jenis pohon tertentu secara intensif untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri kehutanan seperti kayu, kertas, dan energi.
IAD	*Integrated Area Development* atau Pembangunan Wilayah Terpadu adalah pendekatan pembangunan yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologi secara bersamaan untuk mengoptimalkan potensi suatu wilayah. Konsep ini sangat lekat dengan program Perhutanan Sosial, di mana masyarakat di sekitar kawasan hutan diberdayakan sebagai pelaku utama pengelola wilayah.
Inkubator	Lembaga atau program terstruktur yang membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), koperasi, atau model usaha lainnya agar bisa berkembang, mandiri, dan naik kelas melalui pendampingan, pelatihan, serta fasilitas bisnis.
Jejaring Mitra	Kumpulan organisasi non-pemerintah (mencakup organisasi masyarakat sipil, lembaga donor, akademisi, asosiasi petani, maupun sektor swasta) yang bermitra dengan LTKL dan pemerintah kabupaten anggota, untuk menyediakan dukungan teknis, pendanaan, riset, pendampingan lapangan, atau akses pasar.
Kabupaten Anggota	Pemerintah tingkat kabupaten yang secara resmi tergabung dalam LTKL, berkomitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan di daerahnya.
Kemitraan Multi Pihak	Bentuk kerja sama sukarela antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama seperti target pembangunan berkelanjutan.
Lanskap/ *Landscape*	Sistem sosio-ekologi yang didefinisikan oleh suatu wilayah geografis dengan karakteristik ekologi dan sosioekonomi yang sama dan saling berinteraksi.

Masyarakat Adat	Kelompok sosial yang secara turun-temurun mendiami wilayah geografis tertentu, memiliki ikatan asal-usul leluhur serta mengatur kehidupan bersama.
Off-taker	Pembeli tetap yang menjamin untuk menyerap atau membeli hasil produksi dari produsen (seperti petani, nelayan, atau kelompok usaha).
Pendekatan Lanskap	Pendekatan pengelolaan yang menekankan pada kolaborasi multi-pemangku kepentingan untuk memajukan tujuan keberlanjutan bersama dan membangun ketahanan pada skala lanskap.
Perhutanan Sosial	Sistem pengelolaan hutan negara atau hutan adat yang memberikan legalitas hak akses kepada masyarakat setempat untuk mengelola kawasan hutan demi meningkatkan kesejahteraan dan menjaga kelestarian lingkungan.
Proof of Concept (PoC)	Bukti bahwa suatu ide atau solusi dapat berjalan dan diwujudkan secara teknis.
Reforma Agraria	Program penataan ulang struktur penguasaan, kepemilikan, dan pemanfaatan tanah agar lebih berkeadilan bagi masyarakat.
Restorasi Ekosistem	Pemulihan ekosistem yang rusak secara menyeluruh; pengembalian tanah, air, tumbuhan, dan satwa ke kondisi alami seperti sebelum rusak.
RPJMD	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah dokumen perencanaan strategis daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat penjabaran dari visi, misi, serta program kepala daerah terpilih.
RTRW	Rencana tata ruang wilayah, yakni dokumen resmi berisi peta besar dan aturan umum yang dibuat pemerintah untuk mengatur fungsi dan penggunaan lahan di suatu daerah (seperti provinsi, kabupaten, atau kota) untuk jangka waktu 20 tahun.
Rumah Betang	Rumah adat tradisional khas suku Dayak yang berukuran sangat panjang dan besar, serta dihuni secara bersama-sama oleh banyak keluarga.
System Change	Perubahan mendasar pada cara sebuah sistem bekerja, mengubah akar masalah, bukan sekadar gejalanya.
Tenurial	Hubungan sosial dan hukum yang mengatur hak, akses, serta tata cara seseorang atau kelompok dalam menguasai, menggunakan, dan mengelola lahan serta sumber daya alam.
TORA	Tanah Objek Reforma Agraria, yaitu tanah yang dikuasai oleh negara atau masyarakat yang akan didistribusikan kembali atau dilegalisasi.
UMKM	Usaha Mikro, Kecil, Menengah, yaitu jenis usaha atau bisnis produktif yang dikelola oleh perorangan, kelompok, rumah tangga, atau badan usaha kecil.
Wilayah Adat	Ruang hidup, tanah, perairan, dan sumber daya alam yang dikuasai dan dikelola secara turun-temurun oleh Masyarakat Hukum Adat.

Kata Sambutan

Menguji Ketahanan Daerah: Menanam Akar Perubahan di Tingkat Kabupaten

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan

Hutan, tanah, dan air di kabupaten bukan sekadar angka di atas peta atau komoditas ekonomi. Bagi masyarakat lokal, ekosistem yang lestari adalah ruang hidup dan benteng keselamatan jiwa di tengah ancaman krisis iklim yang semakin intensif – alam menyediakan air untuk diminum, bahan pangan untuk dimakan, serta udara untuk kita hirup sehari-hari. Namun di saat ancaman ekologis semakin besar seperti bencana banjir, kebakaran hutan, bahkan krisis air bersih – di saat yang bersamaan daerah juga dihadapkan dengan dinamisnya regulasi pusat-daerah, serta ruang fiskal yang semakin terbatas. Keberadaan LTKL yang menginjak 9 tahun ini kami harapkan dapat memberi makna nyata pada desentralisasi dan otonomi daerah melalui pengembangan ekonomi berbasis potensi alam lokal.

Sejak pembentukannya, kami ingin agar perubahan yang ditinggalkan oleh LTKL tidak hanya terjadi dalam satu aspek, namun terjadi secara holistik dan sistematis agar kabupaten dapat lebih lenting dan kuat saat krisis datang. Saat ini, kami mendorong model inovasi rantai nilai komoditas (seperti nanas di lahan gambut yang dikelola dan diproduksi dalam bentuk produk turunan atau kopi agroforestri untuk meningkatkan ketahanan pendapatan dan diversifikasi), tata kelola multi pihak, serta tentunya proteksi lingkungan sebagai penyangga dan pelindung utama agar daerah tetap resilien dan mandiri. Sejauh ini bukti di tingkat tapak menunjukkan, bahwa adanya perubahan-perubahan di tingkat nasional dan saat bencana terjadi, kabupaten tetap kuat dan berdaya.

Dalam laporan ini, kami akan menampilkan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pemangku kepentingan di daerah, mulai dari pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil, dan apa dampaknya bagi masyarakat dan kabupaten secara umum. Laporan ini juga dapat menjadi refleksi dan pembelajaran bahwa selama 9 tahun membangun kabupaten lestari bersama menunjukkan bahwa peningkatan kualitas program tidak harus berarti memperluas cakupan kuantitatif, namun memastikan agar nilai-nilai kelestarian, pola pikir, dan mekanisme ekonomi benar-benar meresap dan mengakar kuat di dalam struktur kebijakan serta budaya masyarakat lokal. Jika akarnya sudah dalam, replikasi dan pembesaran skala akan terjadi secara alami dan berkelanjutan.

Kami mengapresiasi seluruh pihak yang telah menjadi bagian dalam gerakan ini. Di tengah banyaknya ketidakpastian ekonomi juga krisis iklim yang semakin buruk, banyak inisiatif dan solusi yang tidak dapat dikerjakan sendiri-sendiri. Untuk itu kami mengajak seluruh pemangku kepentingan – mitra donor, pemerintah pusat, hingga sektor swasta – untuk menjadikan daerah sebagai mitra investasi hijau yang siap bergotong royong dari tapak.

Salam Lestari,



Mohamad Rizal Intjenae
Ketua Umum LTKL &
Bupati Sigi



Ristika Putri Istanti
Kepala Sekretariat LTKL



Sarman Simanjorang
Direktur Eksekutif
Asosiasi Pemerintah Kabupaten
Seluruh Indonesia (APKASI)

Ringkasan Eksekutif

Menguji Ketahanan Daerah: Menanam Akar Perubahan di Tingkat Kabupaten

Perjalanan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) kini memasuki fase krusial. Jika periode sebelumnya difokuskan pada penggalangan komitmen dan penguatan gotong royong multipihak, kini energi kolektif tersebut diarahkan untuk mewujudkan bukti nyata *(proof of concept)* ekonomi restoratif di tingkat tapak. Pembangunan berkelanjutan tidak lagi berada dalam tataran komitmen, melainkan diwujudkan sebagai instrumen perlindungan keselamatan jiwa, resiliensi ekologis, dan kesejahteraan ekonomi masyarakat daerah.

Transformasi ini bertumpu pada pendekatan perubahan sistem *(systems change).* LTKL memandang bahwa tantangan keberlanjutan daerah bersifat kompleks dan saling silang, sehingga tidak bisa diselesaikan melalui program yang terkotak-kotak *(silo)*. Melalui pendekatan sistemik, LTKL memetakan simpul daya ungkit strategis: bagaimana perlindungan hulu dan ekosistem gambut memperkuat kedaulatan pangan lokal, menggerakkan komoditas bernilai tambah, hingga membuka akses pasar berkelanjutan yang adil.

Agar intervensi sistemik tersebut tepat sasaran dan berakar kuat, setiap langkah aksi dibangun di atas riset mendalam serta data berbasis bukti *(evidence-based).* LTKL memastikan intervensi tidak dilakukan secara tergesa-gesa tanpa kalkulasi, melainkan didasarkan pada asesmen daya dukung ekosistem dan kebutuhan riil kabupaten anggota.



Capaian lintas tema strategis dalam periode ini dibagi dalam beberapa pilar utama:

- Ketahanan Lanskap, Pangan, dan Mitigasi Bencana: Menghubungkan penataan ruang dengan ketahanan iklim dan kedaulatan pangan lokal. Capaian mencakup mitigasi geologis dan adaptasi iklim berbasis energi terbarukan di Sigi, pemulihan ekosistem penting di Kalimantan Barat, kajian etnografi kedaulatan pangan lokal, serta inkubasi produk pangan bernilai tambah di Sintang, Siak, dan Sigi

- Kepastian Tenurial dan Tata Kelola Lahan Berkelanjutan: Menjamin kepastian ruang hidup dan kedaulatan ekonomi masyarakat melalui skema Perhutanan Sosial, model Tanah Objek Reforma Agraria komunal, perlindungan APL Berhutan Rimba Gupung (Sintang), serta praktik pertanian mandiri di Bone Bolango & Gorontalo.

- Transparansi Rantai Pasok dan Akuntabilitas Data: Membangun ekosistem data terbuka lewat Dashboard Kabupaten dan penilaian *Landscape Maturity* di tingkat yurisdiksi. Di tingkat hulu, ketertelusuran komoditas perkebunan diperkuat melalui pemetaan mandiri oleh kader desa untuk memenuhi kepatuhan pasar global.

- Penguatan Ekosistem Bisnis, Kebijakan, dan Pendanaan Inovatif: Menyiapkan kesiapan investasi UMKM hijau melalui inkubator lokal, mobilisasi pendanaan publik-swasta, analisis ketahanan fiskal daerah, serta analisis dampak regulasi (RIA) untuk hilirisasi Produk Unggulan Daerah Berbasis Alam.

- Gerakan Komunitas dan Penguatan Pengetahuan Lokal: Menjangkarkan intervensi pada pemahaman sosio-kultural dan modal sosial di tingkat tapak. Mulai dari integrasi pilar pranata sosial, konsolidasi gerakan seni-budaya pemuda penyelamat Sungai Kapuas (Nusi Ari Kapuas), aktivasi platform media komunitas Explore Siak, hingga rekonstruksi sejarah bencana berbasis bahasa lokal melalui Kamus Toponimi PASIGALA.

  Rangkaian capaian ini membuktikan bahwa keberlanjutan dapat terjadi ketika kebijakan pemerintah, mekanisme pasar, dan kesiapan fiskal bersinergi utuh dengan realitas serta kearifan masyarakat tapak. Dengan keterpaduan ini, LTKL berupaya agar transformasi ekonomi restoratif berlangsung adil, terukur, dan berdampak jangka panjang.

Sekilas Dampak



Sekilas Dampak 9 Tahun

(2017-2026)

255.310
hektar

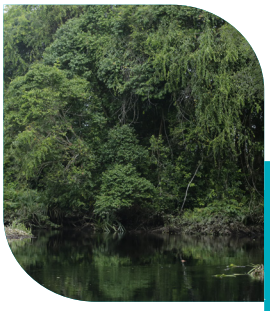
tutupan hutan dan lahan gambut telah dilindungi oleh kabupaten anggota LTKL (159.879 Ha tutupan hutan dan lahan gambut 95.431 Ha)

2.25x
kenaikan

pada pendapatan per bulan pada petani yang telah didampingi oleh jejaring mitra LTKL.

26.869 KK / 94.638 jiwa

telah terdampak dari program dan aktivitas yang dilakukan oleh ekosistem kabupaten dan mitra LTKL.







174 Unit Bisnis Lokal

(UMKM, Koperasi, Kelompok Sadar Wisata - Pokdarwis) telah diinkubasi selama 9 tahun terakhir di 9 kabupaten anggota.

134 Mitra

telah digandeng LTKL dan 74 di antaranya telah mendapatkan akses pendanaan secara langsung untuk mendukung target kabupaten.





Data di atas merupakan angka kumulatif periode 2019–2026 yang dihitung melalui analisis perubahan sistem berbasis dampak (outcome) dan verifikasi spasial berdasarkan aksi kolaboratif pemerintah kabupaten anggota LTKL bersama jejaring mitra.

Sumber analisis data: MapBiomas Indonesia - Collection 4.0 time-series maps of land-use and land-cover, diakses pada Agustus 2026

Menata Ulang Arah Ekonomi: Mengubah Tantangan Pembangunan menjadi Resiliensi Tapak

Negara-negara Global Selatan *(Global South)* terjebak dalam dilema pembangunan. Di satu sisi, demi mengejar ketertinggalan ekonomi dan prioritas pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) masih sangat mengandalkan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, model ekonomi seperti ini mempercepat degradasi alam dan menjadi faktor utama krisis iklim global. Terlebih lagi adanya perubahan dinamika geopolitik global juga turut memicu penurunan alokasi pendanaan publik *(public/government-based funds)* untuk isu iklim dari negara-negara maju, sehingga negara di Global Selatan dituntut mandiri mencari jalan keluar bagi pembangunan berkelanjutan.



Sebagai bagian dari Global Selatan, pengalaman Indonesia memperlihatkan kondisi tarik-menarik kepentingan tersebut secara nyata. Sektor komoditas unggulan seperti kelapa sawit, misalnya, selama beberapa dekade telah menjadi penggerak ekonomi penting bagi negara dengan mendorong pendapatan daerah, berkontribusi signifikan pada PDB Indonesia, serta menyerap jutaan tenaga kerja. Namun, ketergantungan pada model ekstraktif seperti ini membawa dampak negatif terhadap lingkungan dan keadilan sosial, seperti deforestasi, degradasi ekosistem, tingginya emisi gas rumah kaca, dan ketidakmerataan ekonomi.

Selain itu, tantangan di tingkat tapak kian kompleks akibat ancaman bencana yang berulang—mulai dari banjir bandang, gempa bumi, hingga kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan. Ketika risiko bencana meningkat, pemerintah daerah justru berhadapan dengan ruang fiskal yang menyempit akibat efisiensi transfer ke daerah serta tantangan sinkronisasi kebijakan antara pusat dan daerah.

Di tengah tantangan pembangunan ekonomi, keterbatasan fiskal, dan ancaman iklim, LTKL memposisikan diri sebagai penggerak sistem *(system enabler)*, perajut jejaring *(network builder)*, pendorong ekosistem *(ecosystem builder)*. LTKL bergerak agar seluruh pihak seperti lembaga non-pemerintah, mitra pembangunan, hingga masyarakat sipil bersama dengan pemerintah kabupaten bergerak untuk mendorong perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi melalui ekonomi restoratif. Pendekatan ini menjadi suatu model pembangunan ekonomi dengan berlandaskan pada perlindungan dan pemulihan ekosistem penting dengan menciptakan nilai tambah ekonomi baru yang berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Relevansi pendekatan ini terlihat nyata di daerah kabupaten anggota. Ada daerah yang memprioritaskan penjagaan tutupan hutan dan baru pulih dari bencana alam besar, penguatan tata kelola komoditas berkelanjutan dan inovasi ekonomi lokal berhasil membawa kabupaten keluar dari status daerah tertinggal (3T). Ada juga daerah yang memiliki dominasi industri monokultur, memilih untuk memperbaiki tata guna lahan tanpa ekspansi berlebihan dan secara paralel mengembangkan alternatif lainnya. Hal ini membuktikan bahwa resiliensi daerah bukan dibangun lewat proyek jangka pendek yang terfragmentasi, melainkan melalui kerja kolektif yang menata ulang sistem ekonomi langsung dari akar rumput. Melalui laporan ini, LTKL memotret bagaimana pendekatan sistem tersebut terus diuji, diperkuat, dan direplikasi di seluruh kabupaten anggota.



Pendekatan LTKL

Bagaimana Kami Bekerja dalam Ekosistem



Gambar 1. Pendekatan Perubahan Sistem.

Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) dibentuk pada 2017 atas inisiatif sembilan kabupaten di Indonesia yang berkomitmen mentransformasi tata kelola wilayah demi keberlanjutan. Sejak berdiri, LTKL terus mempertajam strategi untuk mencapai Visi 2030: mewujudkan kabupaten yang maju dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, perlindungan ekosistem, tata kelola yang adil, serta kesejahteraan masyarakat.

Untuk mencapai visi tersebut, LTKL mendorong ekonomi restoratif—model ekonomi yang tidak hanya mengejar nilai tambah, tetapi secara aktif memulihkan fungsi ekosistem dan meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Pendekatan ini memastikan aktivitas ekonomi daerah mampu memperbaiki kerusakan lingkungan masa lalu, menjaga ekosistem penting yang tersisa, dan menghadirkan dampak sosial yang adil.

Transformasi menuju ekonomi restoratif tidak dapat dilakukan secara linier atau sekadar intervensi berbasis proyek. Kompleksitas tantangan daerah membutuhkan pendekatan perubahan sistem *(systems change approach)* yang berfokus pada dua pilar utama: menumbuhkan pola pikir secara sistemik untuk melihat akar masalah dari akar rumput hingga pembuat kebijakan, serta memahami dinamika manusia untuk menggerakkan perubahan perilaku dan kerja sama kolektif.

Melalui pendekatan ini, LTKL memfasilitasi transformasi kabupaten dengan memanfaatkan momentum dan praktik baik yang sudah ada, memperkuat keterhubungan antara perlindungan alam dan ekonomi, serta menerapkan pengukuran perubahan sistem yang terukur—termasuk aspek yang tak berwujud *(intangible)* seperti kesiapan lokal dan perubahan pola pikir. Pendekatan ini juga mendorong fleksibilitas dan kemampuan adaptasi LTKL dan mitra dalam menghadapi dinamika di lapangan.

Tonggak Capaian LTKL

Penemuan (*Discovery*)

(2017)

- Sejumlah kabupaten berinisiatif mendirikan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) sebagai wadah kolaborasi multipihak dalam pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan.

(2020)

- Pandemi COVID-19 menjadi titik balik LTKL untuk menggeser fokus gerak pada transformasi ekonomi daerah sebagai fondasi utama kabupaten lestari.



Percobaan (*Trial*)

(2021-2022)

- Masa uji coba pengembangan model bisnis berkelanjutan bernilai tambah sebagai transformasi ekonomi kabupaten, salah satunya melalui pengembangan albumin untuk proteksi gambut.
- Mendorong narasi ekonomi berbasis alam di tingkat nasional untuk memperkuat konsep kabupaten lestari.



Pembuktian *(Proof of Concept)*

(2023-2024)

- Terjadi transisi kepemimpinan di tingkat kabupaten anggota dan sekretariat, LTKL memperkuat arah organisasi, melebarkan jejaring kolaborasi, dan mempertajam visi LTKL 2030.
- Merancang model *Proof of Concept (PoC)* Kabupaten Lestari secara mendalam dan holistik, melalui pendekatan ekonomi berbasis pada proteksi dan restorasi.

(2025-2026)

- Model *PoC* di beberapa kabupaten anggota mulai menunjukkan dampak nyata pada penguatan ekonomi lokal dan ekonomi basis alam.
- Memperkuat pendekatan sistem untuk memastikan kesiapan institusi lokal seperti peningkatan kapasitas SDM, inovasi pendanaan, dan penguatan tata kelola.
- Menguji adopsi *PoC* berbasis lanskap lintas batas administratif kabupaten, seperti di Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah.





Peningkatan Skala *(Working at Scale)*

(2027-2030)

Setelah membuktikan keberhasilan model *PoC* kabupaten lestari, sejumlah pendekatan strategis kini didorong ke skala yang lebih luas:

- Mendorong adopsi kebijakan dari bawah ke atas, sebagaimana dicontohkan di Kalimantan Barat saat kebijakan inovasi produk berbasis alam di tiga kabupaten berhasil diangkat ke tingkat provinsi.
- Mereplikasi inovasi produk bernilai tambah (hilirisasi) ke dalam ekosistem rantai nilai yang lebih luas.
- Mempercepat transformasi sistem ekonomi lewat penyediaan kondisi pemungkin, seperti pemanfaatan energi terbarukan bagi sektor usaha produktif.
- Memperluas dampak berbasis gerakan bersama

Peta dan Target Kabupaten Anggota

Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL) adalah asosiasi pemerintah kabupaten yang dibentuk dan dikelola oleh daerah untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang melindungi alam sekaligus mensejahterakan masyarakat. Berdiri sejak Juli 2017, LTKL berfungsi sebagai kaukus pembangunan lestari dari Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI). Saat ini, LTKL mencakup 9 kabupaten anggota di 6 provinsi yang bergerak bersama mencapai target pembangunan lestari di masing-masing wilayahnya.

Total target perlindungan ekosistem penting seluruh kabupaten: 1.468.358 ha
Total target penerima manfaat (masyarakat yang terdampak positif terhadap program): 468.472 jiwa

1 Kab. Aceh Tamiang

Perlindungan Ekosistem Penting:
37.180 ha (Hutan di Kawasan APL)
Penerima Manfaat Kesejahteraan & Ketahanan Bencana:
39.345 jiwa (4 kecamatan, 20 desa)

2 Kab. Siak

Perlindungan Ekosistem Penting:
16.012,15 ha (di APL melalui IAD, Perhutanan Sosial, Taman Kehati)
Penerima Manfaat (Masyarakat yang Bergantung pada Ekosistem): 1.000 jiwa



[1] *Berdasarkan data target 2025*

3 Kab. Musi Banyasin

Perlindungan Ekosistem Penting:
14.158 ha (10.100 ha APL budidaya + 4.058 ha tegakan Perhutanan Sosial)
Penerima Manfaat Kesejahteraan:
22.186 jiwa (4.591 masyarakat Perhutanan Sosial + 17.595 pekebun komoditas unggulan)

4 Kab. Sanggau

Perlindungan Ekosistem Penting:
143.114 ha/11,41% (hutan, gambut, dan ekosistem terkait)
Penerima Manfaat Kesejahteraan:
Pertambahan 15.454 jiwa masyarakat bergantung ekosistem (dari 497.000 jiwa di tahun 2025)

5 Kab. Sintang

Perlindungan Ekosistem Penting:
1.089.205 ha (272 desa)
Penerima Manfaat Sosioekonomi:
328.145 jiwa

6 Kab. Kapuas Hulu

Perlindungan Ekosistem Penting:
113.592,65 Ha (melalui skema Perhutanan Sosial; hutan adat dan hutan desa)
Penerima manfaat dari intervensi program:
1.750 jiwa

7 Kab. Sigi

Perlindungan Ekosistem Penting:
47.512 ha via Perhutanan Sosial, TORA, rehabilitasi kritis, dan agroforestri
Penerima Manfaat Kesejahteraan:
43.054 jiwa masyarakat lokal

8 Kab. Gorontalo [1]

Perlindungan Ekosistem Penting:
7.208 ha
Penerima Manfaat yakni Masyarakat yang Bergantung pada Ekosistem: 5.000-10.000

9 Kab. Bone Bolango

Perlindungan Ekosistem Penting:
376 ha (8 desa) via eko-agro-edu-wisata, Perhutanan Sosial, dan komoditas unggulan
Penerima Manfaat Kesejahteraan: 12.538 jiwa



Jejak Gerak Kabupaten

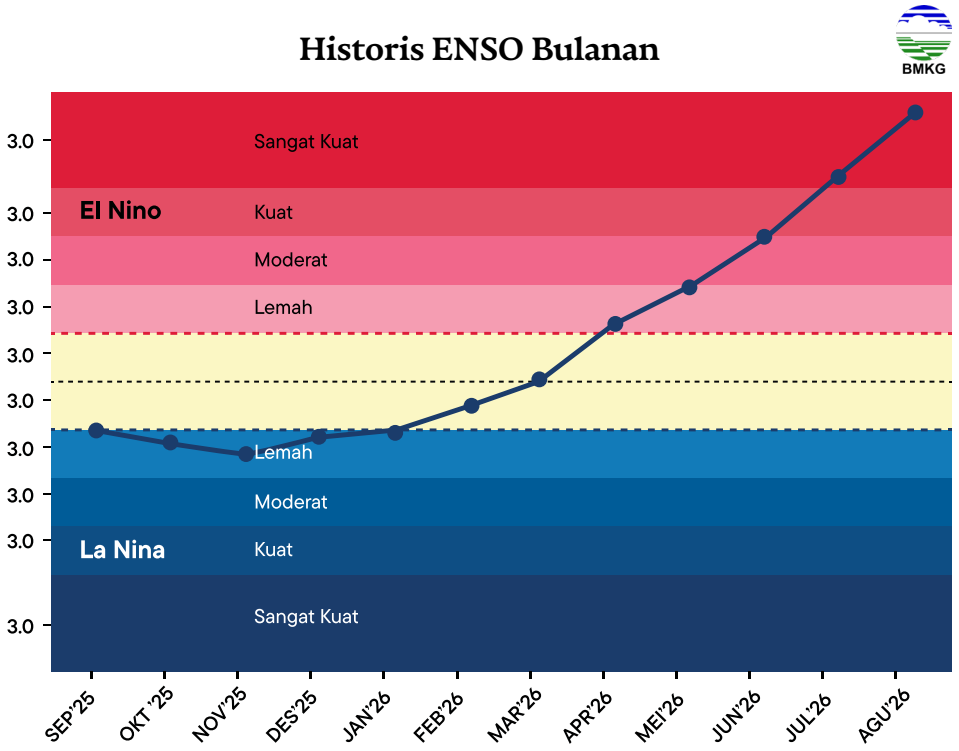




1 Penanggulangan Kebencanaan dan Mitigasi Bencana

Bagi kabupaten anggota LTKL, pembangunan berkelanjutan bukan sekadar agenda ekonomi dan lingkungan, melainkan skema perlindungan keselamatan jiwa. Di tengah meningkatnya frekuensi bencana seperti bencana hidrometeorologi akibat krisis iklim maupun gempa bumi, ketahanan daerah diuji secara nyata. Bencana bukan lagi sekadar peristiwa alam, melainkan ancaman langsung terhadap keselamatan jiwa warga, kerugian ekonomi daerah, dan stabilitas fiskal Pemkab.

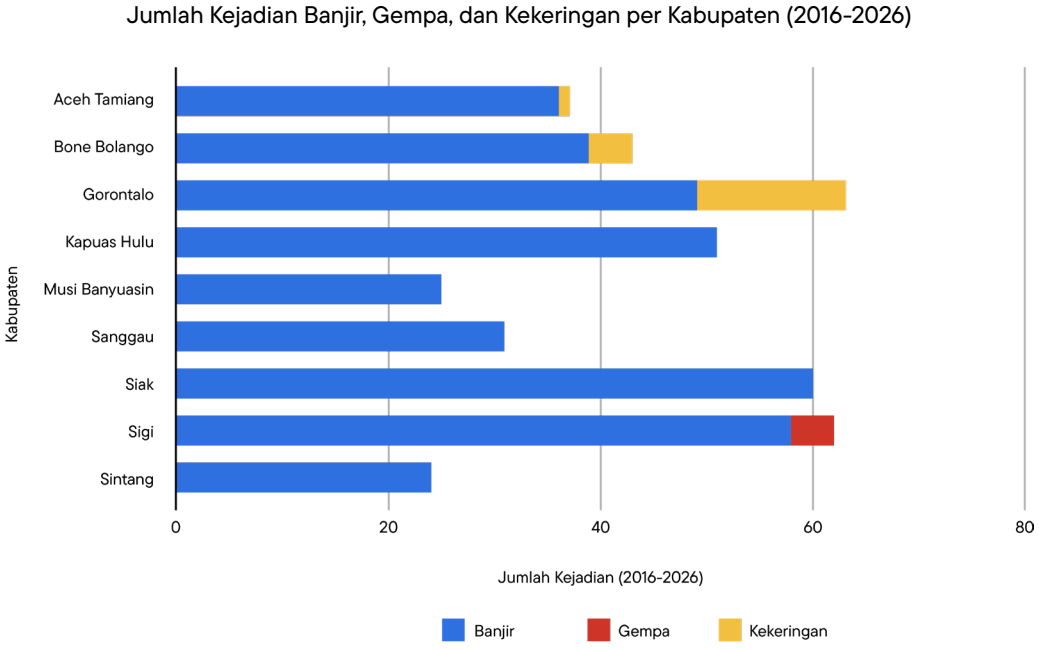
Tingginya kerentanan ini terekam dalam lanskap risiko kebencanaan di 9 kabupaten anggota LTKL sepanjang periode 2016–2026:



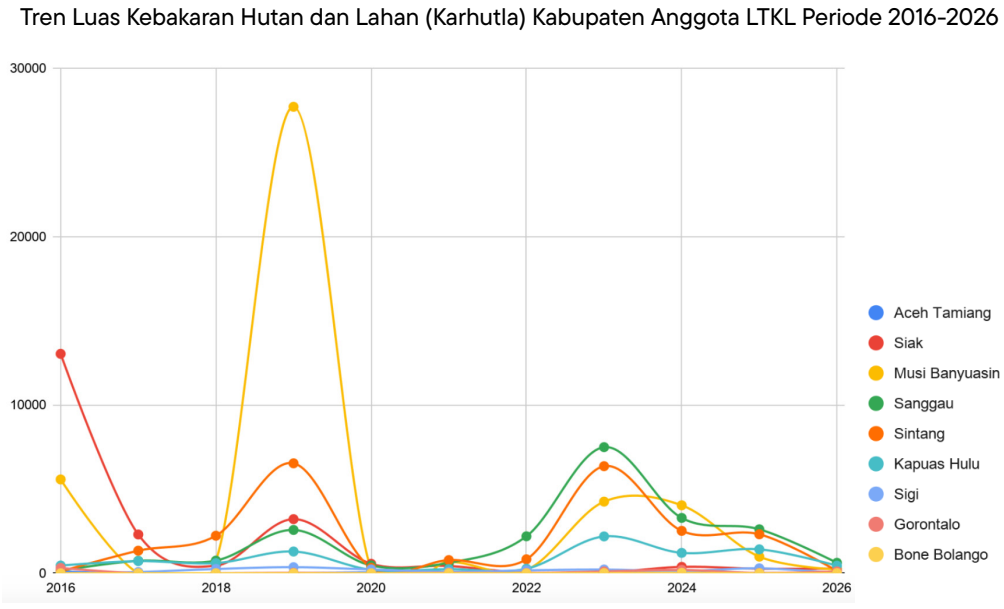
Gambar 2. Tren terjadinya El Nino[2] pada September 2025 - Agustus 2026 di Indonesia. Sumber: BMKG.

Sumber Observasi: JMA MGDSST
Direktorat Perubahan Iklim - BMKG

[2] *El Nino merupakan peristiwa meningkatnya suhu permukaan air laut di Samudra Pasifik yang cenderung menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan, berpotensi menimbulkan kondisi kekeringan di sebagian besar wilayah Indonesia.*



Gambar 3. Jumlah Kejadian Banjir, Gempa dan Kekeringan per Kabupaten Anggota LTKL (2016-2026). Grafik diolah dari data BNPB.



Gambar 4. Tren Luas Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) per Kabupaten Anggota LTKL (2016-2026). Grafik diolah dari Sipongi, Kementerian Kehutanan

Data di atas mengkonfirmasi dua tipologi risiko utama yang dihadapi wilayah anggota, yang menuntut pendekatan mitigasi berbeda di tingkat tapak:

A. Bencana Geologis dan Kesiapsiagaan Sistemik (Kabupaten Sigi)

Setelah gempa besar 2018, Kabupaten Sigi kembali menghadapi gempa bumi berkekuatan 6,7 SR pada 16 Juni 2026 yang berdampak di empat kecamatan. Namun, dampak bencana dapat dimitigasi lebih terukur berkat kesiapan kelembagaan lokal. Sigi telah mengintegrasikan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) ke dalam tata kelola lahan serta memperkuat koordinasi lintas pihak melalui Kemitraan Multipihak Sigi Hijau (KMP). Respons darurat dilakukan secara taktis melalui kaji cepat *(rapid assessment)* yang melibatkan 14 mitra untuk distribusi bantuan. Di luar fase tanggap darurat, Sigi juga memperkuat instrumen mitigasi jangka panjang melalui penyusunan Rencana Aksi Daerah Adaptasi Perubahan Iklim (RAD-API) selama satu tahun terakhir.



B. Bencana Hidrometeorologi dan Tata Kelola Lahan (Aceh Tamiang, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, Bone Bolango)

Dalam dua tahun terakhir, banjir bandang dan karhutla berulang kali melanda wilayah-wilayah ini. Kejadian tersebut tidak semata-mata dipicu oleh perubahan iklim, melainkan juga diperberat oleh tekanan tata kelola lanskap dan proses adaptasi yang belum optimal.

Untuk merespon dinamika kerentanan tersebut, LTKL membantu percepatan bantuan tanggap darurat *(emergency response)* dan penguatan benteng perlindungan alami *(nature-based safeguards)*, mulai dari perlindungan ekosistem penting, daerah aliran sungai (DAS), hingga tutupan hutan.

- Kabupaten Aceh Tamiang menjadi salah satu wilayah terdampak cukup parah pada bencana banjir bandang November 2025 yang lalu. LTKL dan jejaring mitra memberikan bantuan tanggap darurat kolaboratif dan ketahanan energi serta program Laskar Pelangi. Pada program tanggap darurat dan ketahanan energi, LTKL bersama jejaring mitra menyalurkan logistik dasar, 621.600 liter air bersih/hari, sarana evakuasi, dan internet darurat. Selain itu dilakukan juga distribusi panel surya portabel dan 50 unit *micro Solar Home System* bagi 2.000+ keluarga di Aceh Tamiang dan Aceh Timur. Kemudian lewat Program Laskar Pelangi, Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tamiang mengaktifkan kembali sekolah terdampak lewat pembersihan fasilitas (SDN 2 Pilot dan TKN Pembina Karang Baru, SD Pantai Tinjau), pembangunan sumur bor (Desa Tanah Terban dan Kantor Dinas Pendidikan), dukungan psikososial anak, dan pembentukan Sekretariat Bersama untuk koordinasi pemulihan pendidikan.



- Mendasari hal tersebut, beberapa riset telah dilakukan untuk melakukan rehabilitasi lahan kritis di empat kabupaten, seperti Sintang dengan target 148 ha/tahun, Sanggau 150 ha/tahun, Sigi dengan target 70 ha/tahun dan Kapuas Hulu sebesar 51 ha/tahun dengan catatan target tersebut berbasis skenario dan asumsi yang dilakukan oleh Cendekia Iklim Indonesia di tahun 2025.
- *Kebijakan FOLU Net Sink 2030*[3] yang telah dibangun di beberapa provinsi seperti Riau, Kalimantan Barat dan Sulawesi Tengah juga menjadi momentum untuk kabupaten dapat melakukan proses integrasi. Kabupaten anggota LTKL (Siak, Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu dan Sigi) telah membangun rencana strategis yang mendukung FOLU Net Sink di daerahnya, seperti sistem restorasi hingga model ekosistem yang dibangun seperti agroforestri.



[3] *Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink adalah target Indonesia agar tingkat penyerapan emisi gas rumah kaca dari sektor kehutanan dan penggunaan lahan (Forestry and Other Land Use) pada tahun 2030 akan seimbang atau lebih tinggi daripada jumlah*

2 Pendekatan Nexus Hutan-Pangan Lokal

Untuk membangun perubahan sistem, pendekatan terpadu lintas sektor *(nexus approach)* adalah daya ungkit utama dalam menjawab kompleksitas di tingkat daerah. Pendekatan ini menghubungkan ketahanan pangan secara menyeluruh dengan dimensi sosial-budaya, ekologi, dan ekonomi.

Melalui pendekatan ini, strategi perlindungan hutan dan gambut diintegrasikan langsung dengan penguatan pangan lokal serta peningkatan nilai tambah komoditas. Sistem pangan memiliki keterhubungan dari hulu hingga hilir dan relevan dengan konteks kabupaten anggota LTKL saat ini.

A. Kedaulatan Pangan yang Didorong Masyarakat Lokal Kalimantan Barat (Kapuas Hulu, Sintang, Sanggau)

Kajian etnografis oleh Bakudapan (2025) di Kapuas Hulu, Sintang, dan Sanggau memotret ketangguhan pangan berbasis keanekaragaman hayati, pengetahuan pengolahan tradisional, solidaritas ekonomi, serta daya adaptasi komunitas terhadap perubahan bentang alam.

Di Kapuas Hulu (Danau Sentarum), masyarakat adat Dayak Iban dan Tamambaloh melestarikan puluhan varietas benih padi ladang di *sadau*[4] Rumah Betang, memanfaatkan daun sengkuba[5] sebagai penyedap alami, serta mengolah ikan asap rawa gambut. Melalui Warung Makan Padmi di Lanjak Deras, Maria Itotanti mempelopori diplomasi kuliner adat sekaligus membangun ekonomi sirkular bersama nelayan perempuan demi memutus ketergantungan pada tengkulak.

Di Kabupaten Sintang, di Kafe Jerau milik Velisitas, mereka menyajikan pangan alami hutan Dayak Seberuang tanpa bumbu sintetis. Sementara itu di Rumah Betang Ensaid Panjang, Mamak Katarina Andriani meramban pangan dan pewarna alami tenun dari Hutan Adat Tawang Serimbak, sembari menyuarakan pentingnya mempertahankan kemandirian energi rumah tangga melalui Rumah Betang tradisional.





Sumber foto: Bakudapan

[4] *Ruang loteng atau lumbung yang terletak di bagian atas Rumah Betang*
[5] *Tanaman liar asal Kalimantan Barat yang dikenal secara tradisional sebagai penyedap rasa alami*

Di Sanggau, Kelompok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Meliau Hulu beradaptasi di tengah dominasi kebun sawit (mencakup 24,63% wilayah mereka tinggal) dengan mengolah umbut dan kulat sawit, fermentasi *pekasam* (dari ikan sungai), serta sayur rampai musiman.

Rangkaian praktik ini menegaskan peran kepemimpinan kaum perempuan sebagai penjaga pengetahuan pangan dan penggerak ekonomi tapak. Diplomasi cita rasa lokal serta diversifikasi pangan mandiri terbukti menjadi pilar utama perlindungan ruang hidup dan resiliensi ekologis daerah.

Informasi mengenai kajian selengkapnya dapat diakses melalui kode QR di atas

B. Pendekatan Nexus Pangan—Air—Energi Terbarukan

Hingga tahun 2028 mendatang, Sigi mendapatkan pendanaan dari Adaptation Fund sebesar USD 1 juta untuk mendorong ketahanan desa untuk adaptasi perubahan iklim terutama di daerah yang terdampak bencana banjir bandang. Program ini berfokus pada penguatan sistem pangan lokal berkelanjutan melalui penyediaan akses air bersih/irigasi dan pemanfaatan energi terbarukan. Intervensi tersebut dilakukan dalam bentuk konsorsium bersama Yayasan Koaksi Indonesia, AWS Indonesia, dan Earth Innovation Institute di 6 desa intervensi di Kabupaten Sigi.



C. Inovasi Sistem Pangan Lokal untuk Kesehatan dan Produk Lokal

Pengembangan inovasi pangan sehat dijalankan melalui peran inkubator dan entitas riset lokal di tiga wilayah. Di Kabupaten Sigi, Gampiri Interaksi Lestari mendorong hilirisasi kelor menjadi aneka produk kesehatan. Sementara di Kabupaten Siak, Laboratorium Inovasi Siak (di bawah Alam Siak Lestari) memformulasikan olahan kelor khusus ibu menyusui bermerek Yomom.

Selain itu, Sintang Semesta Lestari (SSL) menjadi perusahaan R&D yang berfokus pada pangan lokal di Sintang, Kalimantan Barat yang melakukan R&D terkait bumbu dapur dari rempah hutan hingga biskuit dari tepung ikan toman yang digunakan untuk balita dalam penanggulangan *stunting*.





3 Tata Guna Lahan

Penyerahan hak kelola atas kawasan berhutan dan ruang hidup masyarakat—baik melalui skema Perhutanan Sosial, Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), maupun perlindungan Area Penggunaan Lain (APL) berhutan—merupakan tonggak penting dalam perbaikan tata kelola agraria di Indonesia. Namun di tingkat tapak, kepastian legalitas dan akses tenurial hanyalah pintu masuk. Tanpa adanya kelembagaan yang kuat, kepastian tata ruang, dan model bisnis yang inklusif, izin yang diterbitkan berisiko tidak memberikan dampak ekonomi nyata sekaligus rentan terdegradasi kembali.

Menjawab tantangan tersebut, LTKL memfokuskan intervensi lanskap pada strategi pasca-izin dan optimalisasi hak kelola tersebut untuk dikembangkan menjadi model ekonomi berbasis masyarakat. Melalui kolaborasi multipihak dengan pemerintah daerah, komunitas, dan mitra di tapak, intervensi dirancang untuk mentransformasi hak kelola formal menjadi model ekonomi berbasis lingkungan serta mendorong praktik pemanfaatan lahan yang adaptif.

A. Hak Masyarakat dalam Pengelolaan Lahan

Pemberian kepastian tenurial dan tata ruang partisipatif menjadi fondasi utama untuk melindungi ruang hidup masyarakat dari ancaman deforestasi serta ekspansi industri ekstraktif.

a. Perhutanan Sosial

- **Integrasi Tata Ruang Desa dan Usaha Komunitas di Kapuas Hulu dan Sanggau**

  Merespons ancaman ekspansi sawit monokultur di Lanskap Bentarum (Kabupaten Kapuas Hulu) serta tumpang tindih kawasan pertambangan di Lanskap Mendawak (salah satunya di Kabupaten Sanggau), di 2025-2026, Yayasan Sangga Bumi Lestari memfasilitasi penyusunan Rencana Tata Ruang Desa (RTRD) bersama instansi pemerintah daerah terkait di enam desa dampingan. RTRD disusun sebagai perlindungan ruang hidup secara legal dengan membagi wilayah desa menjadi zona perlindungan dan zona produksi, yang diperkuat bukti ilmiah melalui pemasangan kamera pengintai *(camera trap)* keanekaragaman hayati di area bernilai konservasi tinggi.





Untuk mengembangkan alternatif ekonomi di zona produksi, masyarakat menjalankan inisiatif Sangga Bumi Farming. Di Kapuas Hulu, inisiatif ini telah memverifikasi 42 petani mitra dan menyalurkan sayuran hidroponik dan konvensional dari Sangga Hub Mataso langsung ke konsumen *(business to consumer - B2C)*. Sedangkan di Sanggau, uji coba pasar dilakukan untuk menyerap sayuran oleh unit usaha *(business to business - B2B)* maupun *B2C*. Pendekatan tata ruang partisipatif yang dipadukan dengan hortikultura terintegrasi ini menjadi model bisnis non-deforestasi nyata dalam menjaga tutupan hutan sekaligus memperkuat ketahanan pangan warga.

- **Pengembangan Area Terintegrasi di Hutan Adat Teraju di Kabupaten Sanggau**

  Menghadapi tingginya tekanan ekspansi sawit, tambang, dan hutan tanaman industri (HTI) di Kabupaten Sanggau, Teraju Indonesia yang merupakan mitra LTKL, menginisiasi pendekatan *Integrated Area Development (IAD)* atau pengembangan area terintegrasi. Pendekatan ini merupakan inisiatif rintisan yang dicoba dalam jangka waktu 6 bulan pada Juni-November 2026 di Hutan Adat Desa Teraju, Kecamatan Toba, Kabupaten Sanggau.

  Melalui forum multipihak Sabang Merah Berdompu, inisiatif ini merumuskan dokumen rencana aksi dan rekomendasi kebijakan untuk mengadvokasikan pengakuan ruang kelola adat ke dalam penyempurnaan rencana tata ruang wilayah (RTRW) kabupaten. Di tingkat tapak, program ini menuntaskan berkas teknis pemetaan partisipatif untuk usulan ke Kementerian Kehutanan, membentuk lembaga pengelola, serta melatih pemantauan hutan berbasis GPS[6].

[6] *Global positioning system, sistem navigasi berbasis satelit yang berfungsi untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah,*



- **Optimalisasi Kemitraan Kehutanan di Kampung Dosan, Kabupaten Siak**

  Pasca-penyelesaian sengketa lahan selama 20 tahun antara masyarakat Kampung Dosan, Kabupaten Siak, dengan PT Arara Abadi, pemerintah menerbitkan izin Perhutanan Sosial melalui skema Kemitraan Kehutanan seluas 1.132 hektar (525 KK penerima manfaat) pada tahun 2023. Setelah itu, PT Arara Abadi juga telah mengalokasikan dana pemberdayaan sebesar Rp 1,7 miliar kepada warga kampung, namun sempat tertunda akibat kendala komunikasi. Perkumpulan Elang memfasilitasi dialog tripartit antara perusahaan dan warga serta melakukan penguatan tata kelola Gabungan Kelompok Tani Hutan (Gapoktanhut) agar dana terserap secara akuntabel. Melalui kolaborasi ini, warga akan mendorong model pertanian terpadu yang mengintegrasikan peternakan sapi dengan hortikultura serta membangun demplot wanatani berbasis 1.000 bibit kopi dan 500 pohon aren.



- **Pendampingan KARSA untuk IAD di Kabupaten Sigi**

  KARSA Institute sebagai bagian dari Kemitraan Multipihak (KMP) Sigi Hijau berhasil mengawal tata kelola lahan berkelanjutan melalui pengintegrasian agenda Sigi Hijau ke dalam dua dokumen perencanaan strategis daerah: RPJMD dan Dokumen Integrasi Area Pembangunan (IAD). Pendampingan intensif dilakukan menyeluruh, mulai dari identifikasi spasial, konsolidasi data tata guna lahan, perumusan naskah, hingga pengesahan resmi. Integrasi ini memastikan skema Perhutanan Sosial dan perlindungan bentang alam resmi diadopsi sebagai prioritas pembangunan daerah dan menjadi basis untuk pengembangan model ekonomi restoratif. Capaian ini memberikan mandat langsung bagi dinas terkait untuk menurunkan aksi hijau ke dalam target Renstra, rencana kerja (Renja) tahunan, serta alokasi APBD Kabupaten Sigi.



- **Model Pengelolaan Hutan Adat Berbasis Ekonomi Restoratif**

  Sejak Mei 2025 hingga saat ini, Yayasan Puter Indonesia (mitra pendamping) bersama Conservana (mitra penyerap hasil/*off-taker)* memperkuat kelembagaan KUPS Ngata Toro yang merupakan Hutan Adat di Kabupaten Sigi (1.746 Ha) melalui pembangunan demplot wanatani 1 hektar sebagai pusat belajar bersama serta aktivasi stasiun pengumpul *(pooling station)*. Langkah ini dilakukan agar komoditas ramah hutan bernilai tinggi, seperti vanili dan serai wangi, terstandarisasi serta terserap langsung oleh pasar industri. Selain itu, intervensi juga didorong dengan pendekatan pangan lokal karena Toro merupakan lumbung padi terbesar di Kabupaten Sigi.



b. Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)

- **TORA di Desa Bunga, Kabupaten Sigi**

  Kabupaten Sigi mempelopori pengelolaan lahan dengan skema TORA berbasis komunal. Pendekatan komunal ini adalah langkah strategis untuk mencegah praktik penggadaian sertifikat TORA perorangan, sekaligus memastikan bahwa lahan dikelola secara terpadu dan berkelanjutan.

  Selama tiga tahun, Pemerintah Kabupaten Sigi dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) membangun inovasi model pengelolaan TORA di Desa Bunga seluas 72 Ha untuk 42 subyek penerima.

  Untuk memperkuat tata kelola di tingkat tapak, Yayasan Puter Indonesia mendukung Pemkab Sigi untuk membentuk kelompok tani dan sedang dalam pendampingan usaha bernilai tambah seperti kemiri dan aren.





Tonggak Capaian TORA di Desa Bunga

Fase 1: Inisiasi & Identifikasi (Jun 2023 – Nov 2024)

Inisiasi 107 ha lahan eks-HGU PT Tulus Sintuvu Karya di Desa Bunga oleh Bupati Sigi dan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA), menghasilkan usulan TORA seluas 72 ha APL untuk 42 calon subjek penerima ke Kementerian ATR/BPN.

Fase 2: Penetapan Legalitas & Subjek (Jun – Des 2025)

Penerbitan Keputusan Menteri ATR/BPN terkait penetapan TORA dari Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN), dilanjutkan SK Bupati Sigi untuk memvalidasi 42 subjek penerima dan pembentukan Taskforce TORA multipihak.

Fase 3: Verifikasi Lapangan & Penataan Ruang (Jan - Apr 2026)

Pemetaan fisik 72 ha lahan yang dibagi menjadi 42 bidang tanah serta alokasi fasilitas komunal (demplot riset, persemaian, dan zona perlindungan mata air).

Fase 4: Alokasi & Skema Hak Lahan (Mei – Sep 2026)

Pelaksanaan cabut lot (pengundian) untuk membagi 42 bidang tanah dan pemasangan 168 patok batas dengan skema Hak Berjangka Waktu (30 tahun di atas HPL Badan Bank Tanah), dengan opsi peningkatan menjadi Hak Milik setelah 10 tahun pemanfaatan produktif.

Fase 5: Pengembangan Model Bisnis (Langkah ke Depan)

Penguatan kelembagaan tapak (kelompok tani/koperasi), perintisan demplot komoditas potensial, dan pembukaan akses pasar berkelanjutan, salah satunya melalui Gampiri Bumi Lestari.

Keterangan:
HGU: Hak Guna Usaha
HPL: Hak Pengelolaan Lahan
Kementerian ATR/BPN: Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

c. Area Penggunaan Lain (APL) Berhutan

- **Pondasi Legalitas Rimba Gupung dan Pengelolaan Usaha Berkelanjutan di Sintang**

  Pemerintah Kabupaten Sintang telah menerbitkan peraturan tentang Rimba Gupung, yakni wilayah adat yang berada di wilayah APL berhutan. Hingga 2024, total luas Rimba Gupung yang telah memperoleh pengakuan legalitas resmi seluas 2.113,04 hektar di 19 desa guna mencegah deforestasi di luar kawasan hutan negara. Namun, masyarakat yang telah mendapatkan akses pengelolaan tersebut memiliki keterbatasan dalam mengembangan model bisnis yang mampu menghasilkan pendapatan tanpa merusak tutupan hutan.

  Menjawab tantangan tersebut, Yayasan Uncin Batu Senentang (YUBS) memfasilitasi persetujuan adat berbasis prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* di Desa Mensiku, Ensaid Panjang, dan Jentawang Hilir. Konsensus ini menjadi dasar penjajakan kemitraan kelola kawasan bernilai konservasi tinggi (HCV) bersama PT Bukitprima Platindo, yang dipadukan dengan pembangunan kebun riset agroforestri kopi dan tanaman produktif bersama Dinas Lingkungan Hidup Sintang untuk memulihkan tutupan lahan. Program ini menyusun rencana bisnis olahan ikan dan kopi lokal, serta membangun demplot wanatani melalui penyaluran 8.400 bibit tanaman produktif dan konservasi dari DLH Sintang.







B. Cara Mengelola Lahan: Pertanian Regeneratif dan Wanatani

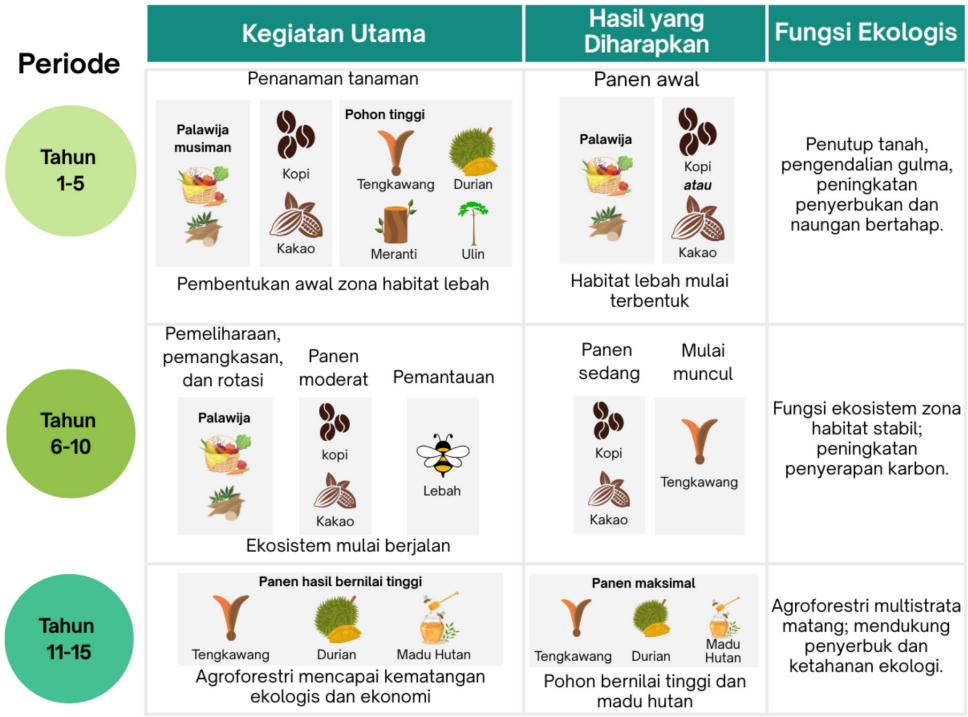
Selain memastikan ruang dan hak kelola terpenuhi, intervensi juga difokuskan pada transformasi praktik budidaya di tingkat tapak agar produktivitas ekonomi tidak mengorbankan daya dukung ekosistem.

- **Pengurangan Deforestasi Berbasis Kebun Adaptif di Penyangga Kawasan Konservasi**

  Tingginya ketergantungan pada monokultur jagung dan penebangan kayu bakar untuk industri gula aren memicu laju perambahan hutan di zona penyangga Taman Nasional Bogani Nani Wartabone (TNBNW) dan Suaka Margasatwa (SM) Nantu-Boliyohuto. Merespons tantangan ini, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Gorontalo berkolaborasi dengan Japesda dan Yayasan Planet Indonesia untuk menginisiasi program kebun adaptif melalui Kelompok Tani Lumbung Pangan Lestari.

  Intervensi dijalankan terukur di empat desa lintas kabupaten (Ilomata, Suka Makmur, Pilolaheya, dan Pangahu). Program ini mencakup pemetaan geospasial titik rawan deforestasi, pelatihan pembuatan pupuk organik mandiri bagi 120 KK untuk memutus ketergantungan pupuk dan obat-obatan kimia mahal, serta pembangunan kebun pangan keluarga guna mendongkrak Skor Pola Pangan Harapan (SPPH). Sebagai rujukan replikasi, inisiatif ini juga melakukan kajian komparasi antara monokultur jagung di Desa Ilomata dengan model agroforestri sukses di Desa Dulamayo Selatan.

  Selain itu, riset yang dikembangkan oleh Cendekia Iklim Indonesia di empat kabupaten anggota LTKL juga telah membangun rujukan model agroforestri dengan gambaran sebagai berikut:



Gambar 5. Skema Pengelolaan dan Produksi Sistem Agroforestri Multifungsi 0-15 Tahun

4 Tata Kelola Rantai Pasok Komoditas Berkelanjutan

Kelapa sawit dan komoditas monokultur telah lama menjadi tulang punggung ekonomi bagi mayoritas kabupaten di Indonesia. Namun, menggantungkan masa depan daerah pada ekspansi lahan yang tak terkendali bukan lagi pilihan yang berkelanjutan. LTKL mendorong transformasi tata kelola komoditas perkebunan: memastikan sektor sawit bergerak menuju praktik bebas deforestasi *(zero deforestation)*, sembari memperkuat daya saing petani swadaya dan membuka peluang ekonomi baru di luar bahan mentah.

Melalui kerja sama lintas pihak di tingkat kabupaten, pendekatan ini berfokus pada dua benteng utama: perlindungan kawasan *(safeguarding)* untuk menghentikan ekspansi skala besar ke areal tutupan hutan, serta penciptaan nilai tambah *(added value)*—mulai dari legalitas petani, sertifikasi berkelanjutan, hingga pemanfaatan limbah komoditas menjadi sumber energi terbarukan.

A. Asesmen Kematangan Lanskap Berkelanjutan di Aceh Tamiang, Siak, dan Sintang

Kabupaten anggota LTKL berperan sebagai 'laboratorium hidup' dalam mengunci pendekatan yurisdiksi untuk mewujudkan rantai pasok komoditas berkelanjutan. Sejak 2018, pendekatan ini menarik minat pembeli global *(buyers)* yang berkomitmen pada praktik bebas deforestasi, salah satunya melalui koalisi *Forest Positive Coalition (FPC)*. Sejalan dengan tren tersebut, inisiatif sertifikasi dan pelaporan global seperti ISEAL dan CDP mengembangkan kerangka *Landscape Maturity* (Kematangan Lanskap) guna mengukur kesiapan suatu yurisdiksi mencapai keberlanjutan mandiri.

Berdasarkan hasil asesmen diagnostik di Aceh Tamiang, Siak, dan Sintang, kesiapan menuju lanskap berkelanjutan mandiri menuntut pembenahan pada aspek-aspek berikut:

1. Integrasi dan akuntabilitas tata kelola data pelaporan perlu diperkuat di ketiga kabupaten
2. Penguatan kapasitas serta kemandirian kelembagaan lokal perlu diperkuat
3. Optimalisasi peran strategis tim penggerak *(backbone team)* untuk menjaga koordinasi lintas pihak juga diperlukan untuk mempercepat pencapaian status lanskap berkelanjutan.

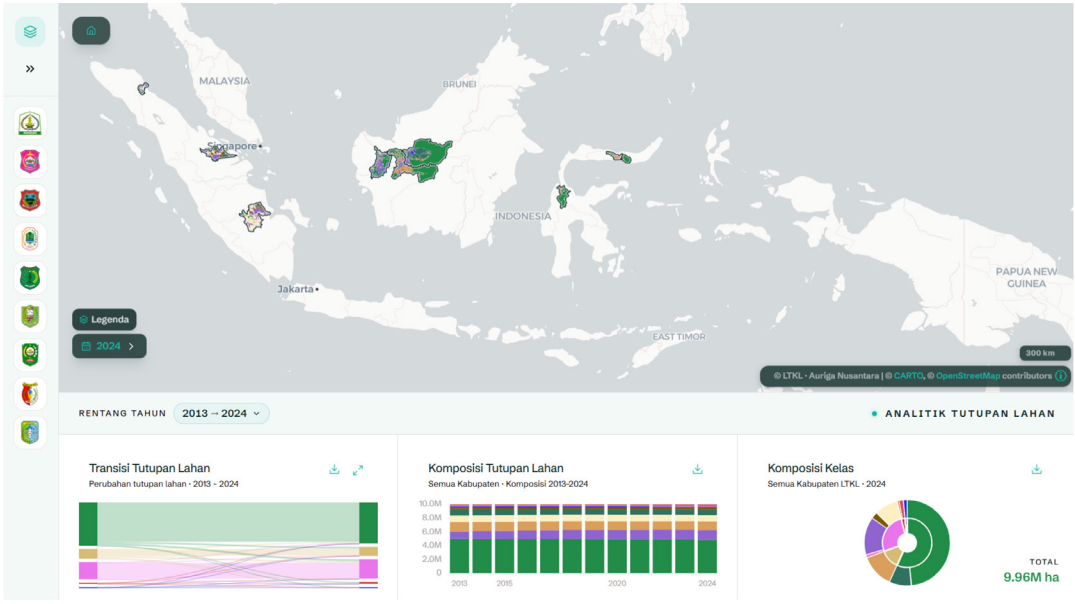


B. Dashboard Pemantauan 9 Kabupaten yang Disusun Secara Multipihak

Guna mengoptimalkan tata kelola data daerah, LTKL berkolaborasi dengan MapBiomas Indonesia (Auriga Nusantara) mengembangkan Dashboard Kabupaten yang dikelola oleh kelembagaan multipihak. Platform data terbuka ini mengintegrasikan data spasial, statistik, dan kualitatif dari pemerintah daerah, mitra pembangunan, serta sektor swasta ke dalam satu portal publik yang akuntabel.

Dashboard Kabupaten Lestari

Dengan menyajikan visualisasi target bersama, aksi kolaborasi, dan portofolio kabupaten, dashboard ini dapat menjadi instrumen transparansi dan pengambilan kebijakan berbasis bukti *(evidence-based policy)*. Keberadaan data terpadu ini akan mempermudah kolaborasi lintas sektor, mempercepat investasi yang lebih tepat sasaran, serta memberikan dampak secara langsung langsung bagi kemajuan kabupaten. Pada level sekretariat, capaian target bersama 9 kabupaten anggota juga dapat dipantau melalui dashboard monitoring LTKL.



Gambar 6. Tangkapan Layar Dashboard Pemantauan Bersama Kabupaten Lestari.

C. Pemetaan Rantai Pasok Komoditas Perkebunan dan Alternatif (Hasil Hutan Bukan Kayu)

Diinisiasi sejak 2025, LTKL berkolaborasi dengan Auriga Nusantara membangun peta rantai pasok dan sistem ketertelusuran *(traceability)* pada komoditas perkebunan (kelapa sawit, karet, kopi, dan kakao) melalui dua pendekatan terpadu:

- Pemetaan partisipatif yang berfokus di tingkat hulu dengan melibatkan petani swadaya, kelompok tani (Gapoktan), serta pemangku kepentingan lokal untuk memverifikasi batas persil lahan, status kepemilikan, tutupan lahan, dan praktik budidaya
- Pemetaan rantai pasok menelusuri alur pergerakan komoditas, volume transaksi, dan perubahan nilai mulai dari petani, pengumpul, industri pengolahan (pabrik), hingga eksportir dan pasar tujuan.

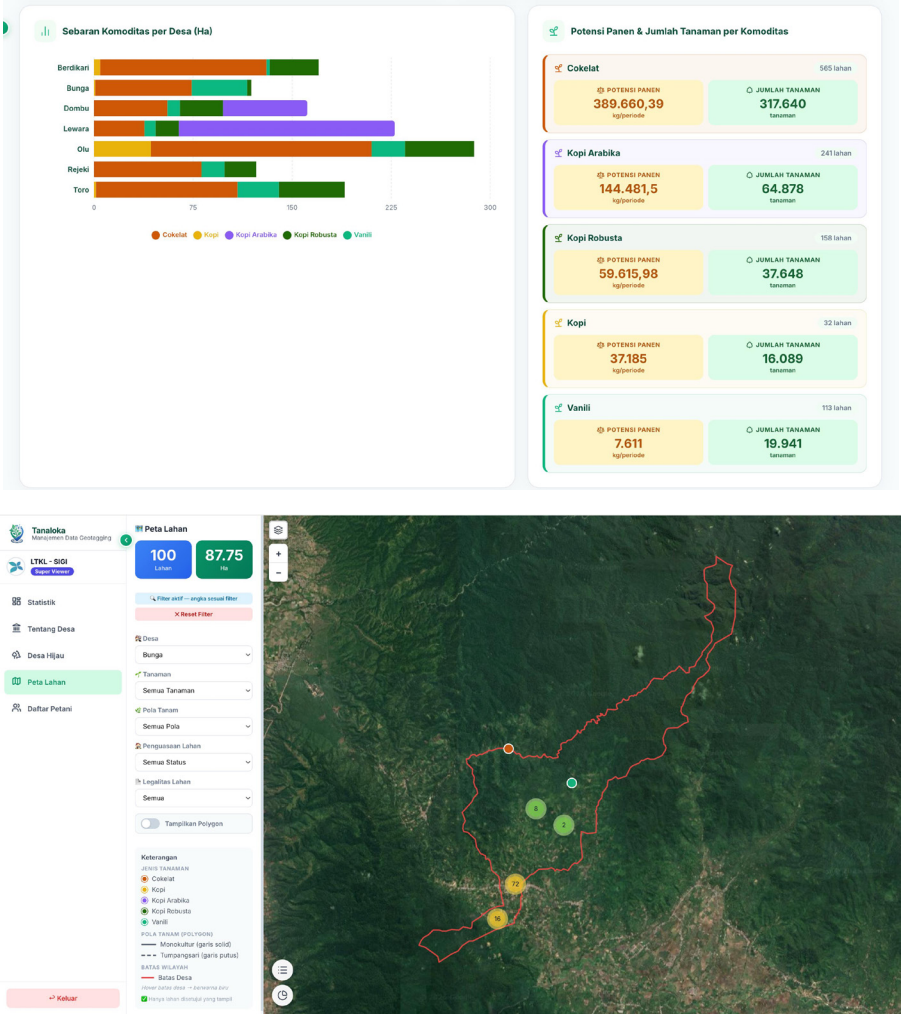
Selain itu, proses pemetaan rantai pasok juga dilakukan terhadap komoditas alternatif khususnya HHBK yang didukung oleh Geonusa Consulting di Kalimantan Barat (Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu) dan Sulawesi (Sigi, Gorontalo dan Bone Bolango). Di wilayah Sulawesi, hasil kajian menunjukkan bahwa komoditas lintas wilayah seperti kelapa, aren, kemiri dan cengkeh merupakan model agroforestri campuran yang sukses mendongkrak ekonomi rumah tangga petani . Sementara di Kalimantan Barat, pemetaan difokuskan pada HHBK dan juga buah hutan.

Integrasi data rantai pasok dari hulu ke hilir yang didukung dengan data administratif dan regulasi dari pemkab ini dapat memastikan transparansi asal-usul produk, standar kepatuhan uji kelayakan *(compliance)* di pasar global dan lokal terhadap produk bebas deforestasi. Selain itu, upaya ini juga akan memperkuat legalitas dan kelembagaan petani agar mendapat harga yang lebih adil di pasar formal.



D. Sistem Penelusuran Berbasis Masyarakat di Kabupaten Sigi

Sistem ketertelusuran komoditas *(traceability)* kini menjadi syarat mutlak dalam perdagangan global seiring berlakunya regulasi bebas deforestasi seperti EUDR (European Union Deforestation Regulation). Merespon hal tersebut, Kabupaten Sigi bersama dengan Yayasan Puter Indonesia membangun sebuah sistem penelusuran bersama operator-operator lokal di 7 desa percontohan untuk melakukan pemetaan partisipatif secara mandiri. Melalui pelatihan ini, tim operator desa mampu mendata koordinat dan poligon dari berbagai jenis wanatani seperti kakao, kopi, dan vanili tanpa perlu menyewa jasa ukur eksternal. Inisiatif ini membantu para petani untuk memiliki basis data spasial untuk potensi sistem ketertelusuran *(traceability)* dan perencanaan komoditas bersama aggregator hulu. Selain itu bagi pemerintah desa hal ini dapat digunakan untuk memperjelas batas dusun dan memastikan tata kelola lahan tidak merambah kawasan lindung. Keberhasilan model ini selanjutnya akan didorong sebagai inovasi desa hijau untuk direplikasi ke tingkat kabupaten dan provinsi.



Gambar 7. Tangkapan Layar Tanaloka untuk Pemetaan Partisipatif Sistem Ketelusuran Komoditas.

5 Bisnis Lokal Inovatif

Pertumbuhan ekonomi daerah tidak harus selalu mengandalkan pembukaan lahan masif untuk tanaman monokultur. Kabupaten anggota LTKL membuktikan bahwa keanekaragaman hayati yang tumbuh alami di sekitar wilayah warga—mulai dari hasil hutan bukan kayu (HHBK), tanaman agroforestri, hingga komoditas lokal seperti nanas dan tengkawang—memiliki nilai ekonomi tinggi jika dikelola secara inovatif.

LTKL memfasilitasi penguatan rantai pasok bioekonomi ini dari hulu ke hilir. Melalui pembentukan lembaga aggregator lokal yang berfungsi sebagai inkubator bisnis dan sentra bisnis *(trading hub),* mendorong riset pengembangan produk *(R&D*) bernilai tambah, hingga memastikan keterlacakan *(traceability)* produk sesuai standar industri komersial, bisnis berbasis alam di daerah kini siap menembus pasar yang lebih luas.

A. Penguatan Inkubator Lokal di Empat Kabupaten Anggota

Guna menjembatani kesenjangan akses modal, legalitas, dan pasar bagi wirausaha ramah lingkungan di tingkat tapak, LTKL memfasilitasi penguatan kelembagaan inkubator bisnis dan sentra kreatif yang dikelola oleh aktor muda daerah.

- **Gampiri Interaksi Lestari (Kabupaten Sigi)**
  Gampiri mengukuhkan kapasitas kelembagaannya dengan meraih predikat Grade B dari Kementerian Koperasi dan UKM menempatkannya di jajaran 100 inkubator terbaik nasional versi SIPENSI[7]. Lembaga ini telah mengawal pertumbuhan 89 *tenant*[8] aktif lintas skala (UMKM, koperasi, dan Pokdarwis), mengombinasikan inkubasi usaha berbasis alam dengan aktivasi pasar ritel *(business to business/B2B),* serta menyalurkan skema investasi mikro produktif *(Impact Fund)* berbasis bagi hasil. Informasi detail terkait sebaran usaha yang diinkubasi dapat diakses di https://tenant-gampiriinkubasi.netlify.app/

- **Samudra Bekudong'k (Kabupaten Sanggau)**
  Berperan sebagai sentra inkubasi dan layanan kreatif, Samudra menghubungkan potensi talenta muda dengan kebutuhan pasar melalui model *Creative Service Hub*. Melalui program TUMBUH, lembaga ini menjangkau 25 UMKM dan mengkurasi unit usaha unggulan menuju inkubasi intensif serta ajang temu bisnis, sekaligus membuka peluang kerja nyata bagi pemuda lokal di sektor ekonomi kreatif.

- **Gemilang Sintang Lestari (Kabupaten Sintang dan Kapuas Hulu)**
  Hingga 2026, Gemilang telah mendampingi total 66 pelaku usaha lestari melalui program inkubasi GEMARI dan inisiatif kemitraan strategis. Intervensi ini berhasil memetakan 73 produk unggulan daerah berbasis alam serta mematangkan kelayakan usaha kelompok lokal strategis, seperti Koperasi Jasa Menenun Mandiri dan kelompok pengelola kawasan Bukit Rentap, agar siap mengakses pasar yang lebih luas dan pembiayaan hijau. Gemilang juga bergerak di Kabupaten Kapuas Hulu dalam proses pendampingan Produk Unggulan Daerah (PUD) basis alam sebanyak 36 UMKM.

[7] *Sistem Informasi Pendaftaran dan Evaluasi Inkubasi yang dikelola oleh Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah*
[8] *Unit usaha dampingan (Kementerian UMKM)*

- **SKELAS (Kabupaten Siak)**

  Mendukung agenda Siak Kabupaten Hijau, SKELAS menggerakkan program KUBISA yang menginkubasi 26 pelaku usaha ramah gambut, dengan mayoritas penerima manfaat adalah perempuan. Program ini mencatat dampak nyata berupa peningkatan rata-rata pendapatan bulanan peserta hingga 52%, pemenuhan legalitas usaha (PIRT[9] dan Halal), serta fasilitasi akses ke pembiayaan tanpa bunga dan gerai pasar ritel modern.





Dengan mendorong pembentukan inkubator lokal dan meningkatkan kapasitasnya, diharapkan dapat memastikan ekosistem kewirausahaan daerah mampu mencetak unit usaha yang mandiri serta berdaya saing secara berkelanjutan.

B. Sentra Bisnis Menghubungkan Komoditas Wanatani Sigi ke Rantai Pasok Premium

Pengembangan ekonomi restoratif di tingkat tapak membutuhkan kepastian pasar dan infrastruktur pengolahan yang adil bagi petani. Bersama LTKL, PT Gampiri Bumi Lestari (GBL) difasilitasi sebagai sentra bisnis *(trading hub)* dan agregator yang mengelola rantai pasok dari logistik panen, stasiun pengumpul, hingga fasilitas pascapanen. GBL menghubungkan komoditas petani langsung ke pembeli siaga *(off-taker)* nasional yakni Java Kirana untuk kopi dan Conservana untuk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), sekaligus memperluas distribusi kopi regional dari Sigi dan Palu hingga ke Gorontalo.

Pada sektor kopi, kolaborasi bersama Java Kirana memperkuat tata kelola pascapanen melalui operasionalisasi tiga unit pengolahan *(mini mills)* di Desa Lewara dan Rejeki, Kabupaten Sigi serta satu fasilitas pengolahan utama di Palu. Didukung skema dana bergulir *(revolving fund)* dan pembiayaan operasional, inisiatif ini hingga 2026 telah menyerap 11,1 ton biji kopi hijau *(green bean)* dari 29 petani mitra dengan total perputaran dana langsung mencapai Rp612 juta, yang dilengkapi pendampingan praktik budidaya berkelanjutan bagi 50 petani.





[9] *Pangan Industri Rumah Tangga adalah izin edar resmi yang diberikan untuk produk makanan dan minuman olahan yang diproduksi oleh usaha skala rumah tangga*

Sementara pada sektor HHBK, kemitraan bersama Conservana mengonsolidasikan rantai pasok agroforestri di sembilan kecamatan di Kabupaten Sigi. Melalui operasionalisasi stasiun pengumpul di Desa Toro, Sigi dan unit distilasi minyak atsiri, kemitraan ini menyerap 1,02 ton vanili serta 1,28 ton sereh wangi dan nilam langsung dari petani mitra.

C. Perusahaan Lokal Mendorong Hilirisasi Komoditas Ramah Gambut Menembus Pasar Komersial di Siak

Inovasi bioekonomi berbasis komoditas ramah gambut di Kabupaten Siak membuktikan bahwa perlindungan lahan gambut dapat berjalan selaras dengan penciptaan nilai tambah ekonomi bernilai tinggi.

- **PT Swarnabhumi Lestari Food (Pinaloka)**
  Mengolah nanas hasil sistem tumpang sari di sela tegakan sawit muda guna mencegah kebakaran lahan, Pinaloka memproduksi aneka olahan berstandar SNI dan BPOM. Mereka memproduksi minuman kaleng, sirup, hingga selai, sekaligus memanfaatkan 70% limbah produksinya menjadi cuka fermentasi. Produk Pinaloka kini menembus 17 gerai ritel di Pekanbaru serta menyuplai bahan baku untuk 6 jaringan *bakery* dan kafe. Model sirkular ini memberikan insentif ekonomi langsung di tingkat tapak dengan menyerap hasil panen 9 petani nanas dari 3 kelompok mitra serta memberdayakan 8 talenta muda lokal.

- **Alam Siak Lestari**
  Hilirisasi ekstrak ikan gabus oleh ASL sukses memperluas penetrasi pasar medis melalui produk berlisensi BPOM: Albugo (kapsul albumin) dan Yomom (booster ASI). Jaringan distribusi ASL tumbuh 57% hingga mencakup 336 apotek dan fasilitas kesehatan di Provinsi Riau serta lima kota di Sumatera Barat, didukung kemitraan klinis bersama RSUD Tengku Rafi'an Siak, dokter spesialis, dan bidan. Pada paruh pertama 2026, strategi ini membukukan penjualan kumulatif 3.392 botol Albugo dengan omzet Rp538,5 juta, serta 322 botol Yomom senilai Rp45,7 juta, membuktikan viabilitas pasar produk kesehatan berbasis konservasi gambut.





D. Riset dan Pengembangan: Dari Laboratorium Menuju Pasar Komersial

Semesta Sintang Lestari (SSL) menunjukkan bahwa fasilitas riset dan pengembangan (R&D) berbasis bahan alam di tingkat kabupaten dapat beroperasi secara mandiri dan menguntungkan. Dari 2024 hingga 2026, SSL mencatatkan estimasi pendapatan kumulatif sebesar Rp 693,9 juta yang bersumber dari dua pilar utama: hilirisasi pangan fungsional dan penyediaan jasa riset terapan bagi pelaku usaha daerah.

- **Hilirisasi Pangan Fungsional dan Intervensi Gizi**
  Menjawab tantangan prevalensi *stunting* di Sintang yang mencapai 29,8% (2025), SSL memproduksi Bischo yakni biskuit gizi berbasis konsentrat protein ikan gabus dan toman lokal. Hingga 2026, sebanyak 17.301 bungkus (865 kg) Bischo diproduksi dengan menyerap sekitar 600 kg ikan dari perairan lokal. Produk ini terserap ke dalam rantai pengadaan publik Pemkab Sintang melalui kemitraan bersama Dinas KBP3A dan didistribusikan langsung ke 20 puskesmas. Inovasi ini diperkaya pengembangan portofolio hasil hutan bukan kayu bernilai tinggi, seperti sirup maram, selai buah hutan bidar, serta percepatan izin edar produk ekstrak albumin Albuneo.

- **Jasa Riset Terapan dan Standarisasi Mutu**
  Untuk mengatasi keterbatasan akses pengujian laboratorium bagi pelaku usaha lokal, SSL menyediakan layanan riset komersial yang pada 2026 dengan menggaet 4 klien kemitraan baru. Cakupan layanannya meliputi standarisasi mutu bumbu daun kesum, uji kelayakan pangan olahan lokal, pengujian efektivitas pupuk organik peternak, hingga riset peningkatan nilai tambah limbah kulit ikan gabus.





Sumber Foto: Kelas Pagi Pangan

E. Membangun Model Pendanaan Inovatif pada Bisnis Lokal di Sintang dan Sigi

Ketergantungan pada skema hibah masih menjadi tantangan utama UMKM lestari di tingkat tapak, yang kerap memicu berhentinya operasional pasca program akibat ketidaksiapan mengakses permodalan komersial. Menjawab kesenjangan tersebut, LTKL memfasilitasi perancangan model pendanaan inovatif *(innovative financing vehicle)* sepanjang 2026 melalui kolaborasi riset bersama Instellar di Kabupaten Sintang dan Zerone di Kabupaten Sigi guna membangun peta jalan transisi dari hibah menuju pembiayaan mandiri.

Di Kabupaten Sintang, kolaborasi bersama Instellar menghasilkan cetak biru *(blueprint)* dan arsitektur operasional model pendanaan berbasis studi kelayakan pasar lokal. Dokumen ini merumuskan tata kelola investasi serta kurikulum pendampingan agar UMKM memenuhi kriteria kelayakan investasi *(investment-ready)*. Menyesuaikan karakteristik di Kalimantan Barat, arsitektur pendanaan ini diposisikan melengkapi ekosistem *Credit Union (CU)* yang telah mengakar kuat di masyarakat, sehingga skema pembiayaan baru dapat terintegrasi tanpa menduplikasi struktur keuangan yang ada.

Sementara di Kabupaten Sigi, kemitraan bersama Zerone merumuskan prosedur uji tuntas *(due diligence)* dan standar penyaluran modal bagi koperasi serta kelompok Perhutanan Sosial di kawasan penyangga Taman Nasional Lore Lindu, khususnya komoditas kakao, kopi, dan HHBK seperti vanili. Menjawab kerentanan usaha mikro yang pernah terdampak bencana, skema ini mengintegrasikan lembaga perantara *(intermediary)* lokal seperti Gampiri Interaksi Lestari untuk memvalidasi kondisi lapangan dan mengawal kepatuhan tata kelola sebelum unit usaha menerima modal pihak ketiga.





F. Portofolio Lanskap

Kabupaten anggota LTKL tengah menyusun dan memvalidasi portofolio investasi berbasis bentang alam *(landscape portfolio)* untuk ekosistem penting dan komoditas unggulan. Bekerja sama dengan mitra riset pasar, pemetaan lanskap, dan pemodelan finansial, portofolio ini akan diintegrasikan serta diperbarui berkala melalui *dashboard* masing-masing daerah.

Penilaian kebutuhan pendanaan telah dipetakan di Kabupaten Sintang, Sanggau, Kapuas Hulu, dan Sigi. Melalui dukungan mitra LTKL seperti Prakarsa dan Maxi Consulting, kesiapan investasi dinilai secara menyeluruh dari aspek tata kelola, daya dukung ekologis, sosial-budaya, hingga kelayakan usaha. Fokus utamanya bukan langsung mencari proyek siap danai, melainkan mengidentifikasi intervensi awal yang paling siap *(low-hanging fruit)* guna memperkuat fondasi ekonomi lokal. Di Kapuas Hulu, intervensi difokuskan di kawasan Danau Sentarum (madu hutan, buah hutan, perikanan tangkap, dan kratom); di Sanggau mencakup komoditas agroforestri tembawang[10], beras lokal, dan biofarmaka; sedangkan di lanskap Kelutap (Sintang) diarahkan pada ekowisata, hortikultura seperti durian, dan rempah seperti cabai rawit, serta rimpang.





[10] *Tembawang adalah sistem pengelolaan lahan tradisional berwujud wanatani atau agroforestri asli dari masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Barat.*

6 Kebijakan & Pendanaan Inovatif

Perubahan sistem di tingkat kabupaten hanya akan berkelanjutan apabila didukung oleh dua pilar utama: payung hukum yang mengikat dan ketahanan fiskal daerah. Di tengah ruang anggaran daerah (APBD) yang semakin terbatas dan dinamisnya regulasi nasional, daerah dituntut untuk melakukan terobosan yang mampu menjamin keberlanjutan agenda pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada dana hibah luar.

LTKL mendampingi kabupaten anggota untuk melakukan pemetaan fiskal dan mendorong pendanaan inovatif. Melalui kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), LTKL mengidentifikasi porsi belanja hijau serta celah kemandirian fiskal daerah. Agar dapat memutus ketergantungan pada APBD murni, LTKL mendorong inovasi pengadaan barang dan jasa pemerintah maupun swasta dengan memprioritaskan pasokan produk lestari lokal, memobilisasi investasi berdampak *(impact investment)* non-pemerintah, serta memperkuat kerangka regulasi guna membuka akses terhadap skema pendanaan iklim tambahan dari pemerintah pusat.

A. Pendanaan Publik

Mengoptimalkan bauran anggaran daerah dan penyerapan belanja pemerintah untuk mendukung program perlindungan ekosistem serta produk bernilai tambah lokal.

- **Pemanfaatan Belanja Kesehatan Publik untuk Produk Komoditas Lestari (Sintang)**

  Dari hasil riset mereka terhadap produk turunan ikan gabus[11], Semesta Sintang Lestari (SSL) memproduksi biskuit ikan gabus Bischo sebagai intervensi penanganan *stunting* di tingkat tapak melalui kemitraan dengan posyandu dan jaringan bidan desa. Skema penyerapan melalui belanja publik daerah ini berhasil melipatgandakan pendapatan SSL hingga 204% pada kuartal pertama 2026, membuktikan bahwa komoditas lestari mampu menjawab kebutuhan program prioritas pemerintah sekaligus mandiri secara finansial.

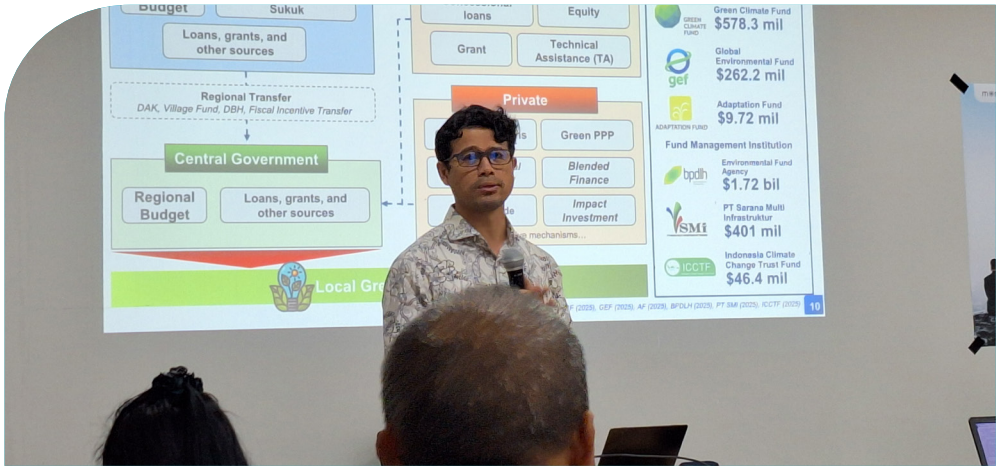


[11] *Penjelasan mendalam mengenai riset Semesta Sintang Lestari dapat dilihat di halaman 41.*

- **Penyelarasan Kebijakan Iklim Daerah: Penguatan Kapasitas Perencana melalui FOLU Net Sink 2030**

  Menjawab tantangan integrasi target iklim nasional ke tingkat tapak, LTKL memfasilitasi penguatan kapasitas perencana daerah dan koalisi masyarakat sipil (CSO) melalui kemitraan strategis antara Perkumpulan Mandala Katalika Indonesia (Manka) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Inisiatif ini mempertemukan analis Bappeda dan Dinas Lingkungan Hidup dari lima kabupaten—Aceh Tamiang, Siak, Sintang, Sanggau, dan Kapuas Hulu—dengan organisasi masyarakat sipil lokal, yaitu Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Perkumpulan Elang, dan Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh.

  Tujuan dari pendampingan tersebut adalah bagaimana memastikan model kebijakan kabupaten untuk mendukung integrasi *FOLU Net Sink 2030* di tingkat provinsi yang akan berdampak terhadap akses inovasi pendanaan. Keterampilan analitis tersebut menghasilkan dokumen rekomendasi kebijakan (*policy brief*) berbasis bukti yang menghubungkan inisiatif tapak—seperti pembatasan ekspansi sawit di Sintang, hilirisasi aren di Sanggau, dan perlindungan nilam di Aceh Tamiang—ke dalam rencana tata guna lahan provinsi demi mencapai target serapan emisi bersih Indonesia *(FOLU Net Sink 2030).*





- **Resiliensi Fiskal: Memperkuat Kemandirian Anggaran Pembangunan Lestari di Delapan Kabupaten**

  Pembangunan berkelanjutan di tingkat tapak kerap terancam oleh keterbatasan ruang fiskal daerah. Kajian resiliensi fiskal yang dilakukan PATTIRO bersama LTKL di delapan kabupaten anggota—Siak, Musi Banyuasin, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, Sigi, Bone Bolango, dan Gorontalo—mengungkap bahwa struktur APBD relatif rentan dengan tingkat ketergantungan terhadap Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat melampaui 80%, bahkan mencapai 90% di Kapuas Hulu.

  Merespons kerentanan ini, kajian memetakan adaptasi daerah ke dalam tiga tingkatan resiliensi: respons absorptif melalui efisiensi belanja rutin; respons adaptif dengan mempertahankan skema insentif Transfer Anggaran Kabupaten berbasis Ekologi (TAKE/EFT) bagi desa di Siak dan Sigi; serta langkah transformatif melalui perampingan organisasi perangkat daerah (OPD) di Gorontalo dan Bone Bolango guna menekan beban belanja birokrasi.

  Sebagai langkah keberlanjutan, inisiatif ini merumuskan peta jalan pendanaan alternatif yang mencakup penerapan *Green Budget Tagging* untuk memantau alokasi belanja hijau lintas dinas, diversifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) berbasis jasa ekosistem seperti ekowisata dan perikanan lestari, serta penyiapan portofolio proyek hijau yang siap menyerap investasi non-pemerintah.





B. Pendanaan Privat

- **Mobilisasi Investasi untuk Mendorong Skala Bisnis Berbasis Alam**

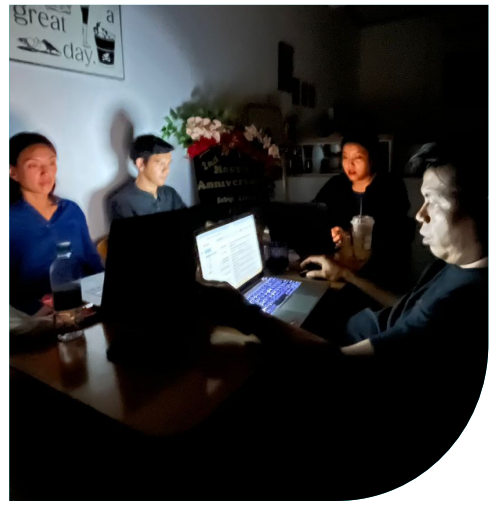
  Penguatan bisnis berbasis alam di tingkat tapak memerlukan instrumen keuangan yang adaptif terhadap karakteristik usaha lokal. Bekerja sama dengan manajer investasi Nusa Transformation Venture (NTV) dan Terratai, LTKL memfasilitasi penyaluran modal kerja fleksibel guna mengakselerasi kemandirian wirausaha lestari.

  Salah satu capaian nyata terlihat pada Forestwise di Kalimantan Barat yang mengembangkan rantai pasok tengkawang. Dukungan pinjaman modal kerja dari Terratai sebesar USD 50.000 dan instrumen SAFE dari NTV senilai USD 70.000 berhasil mendongkrak performa usaha secara signifikan: pembiayaan lunas satu tahun lebih cepat, penjualan melonjak 325% pada 2024, serta pendapatan 804 petani mitra meningkat hingga 2,25 kali lipat.

  Ekspansi pembiayaan inovatif ini terus bergulir di berbagai kabupaten anggota:

  - NTV telah menyalurkan 100% alokasi pendanaannya ke tiga entitas portofolio, yakni mencakup instrumen *Convertible Note* (Rp1,45 miliar) dan pinjaman modal kerja (Rp660 juta) untuk Arconesia di sektor pertanian adaptif iklim, penyertaan modal (ekuitas) bagi hilirisasi gambut PT Alam Siak Lestari (ASL), serta Forestwise. Dukungan pendanaan ini turut menopang rantai operasional ketiga portofolio tersebut, yang secara kumulatif menjangkau lebih dari 2.000 warga serta berpotensi melindungi 400.000 hektar ekosistem penting melalui kemitraan masyarakat.
  - Melalui fasilitas pendanaan katalitik Jembatan oleh Terratai, dukungan modal dari LTKL berperan sebagai stimulan dalam menghimpun dan menyalurkan total pembiayaan hijau sebesar USD 585.000 bersama mitra pendana lainnya, yang turut mencakup skema penjaminan berbasis syariah. Fasilitas pembiayaan bersama ini terus memperluas investasi ke unit usaha potensial di tingkat tapak, seperti MYCOLAB Tech di Aceh Tamiang.





C. Kebijakan

- Analisis Dampak Regulasi untuk Produk Unggulan Daerah Basis Alam

  Kebijakan daerah kerap berhenti sebatas terbitnya dokumen regulasi tanpa evaluasi mendalam terhadap efektivitas dan dampak implementasinya. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama LTKL dan Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah Universitas Indonesia (PEBS UI) menyusun *Regulatory Impact Assessment (RIA)* terkait regulasi Produk Unggulan Daerah (PUD) Berbasis Alam dengan mengambil pembelajaran dari tiga kabupaten anggota LTKL (Sintang, Sanggau dan Kapuas Hulu).

  Kajian RIA ini mengidentifikasi sejumlah temuan strategis untuk optimalisasi kebijakan di tingkat daerah:

  - Prioritas komoditas berdaya ungkit tinggi: Pengembangan model percontohan PUD perlu diprioritaskan pada komoditas dengan angka pengganda output *(output multiplier)* serta keterkaitan ke sektor hulu *(backward linkage)* yang tinggi, seperti industri makanan dan minuman berbasis alam

  - Proyeksi ekonomi terukur: Dampak ekonomi dapat diukur secara komprehensif (mulai dari skenario pesimis hingga moderat) untuk memproyeksikan penerimaan daerah dan tenaga kerja

  - Investasi jangka panjang: Meski membutuhkan belanja modal awal yang lebih tinggi untuk infrastruktur rantai pasok berkelanjutan, pengembangan PUD Berbasis Alam menghasilkan tingkat pengembalian investasi *(return on investment)* yang jauh lebih besar dan berkelanjutan bagi ekonomi daerah.



7 Pengorganisasian Komunitas

Penguatan kebijakan di tingkat kabupaten membutuhkan pijakan yang kuat di tingkat tapak. Kebijakan daerah hanya dapat berjalan efektif apabila dirancang berdasarkan realitas dan kebutuhan nyata masyarakat di lapangan. Menjawab kebutuhan tersebut, LTKL menempatkan pengorganisasian komunitas *(community organizing)* sebagai bagian integral dari strategi perubahan sistem. Melalui kehadiran pendamping lapangan, LTKL memfasilitasi proses komunikasi dan pemetaan dinamika sosial secara berkala.

Fungsi utama intervensi tapak ini adalah memastikan aspirasi, potensi, dan tantangan yang dihadapi warga di akar rumput dapat teridentifikasi dengan baik, untuk kemudian diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan dan skema tata kelola pembangunan di tingkat kabupaten.

A. Pemetaan Sosial & Penguatan Kapasitas berbasis Kelembagaan di Sigi dan Sanggau

Keberhasilan implementasi Reforma Agraria dan Perhutanan Sosial tidak hanya ditentukan oleh kepastian batas fisik lahan, melainkan juga kesiapan struktur sosial masyarakat di tingkat tapak. Menyadari hal tersebut, LTKL bersama Yayasan Puter Indonesia menerapkan metodologi pemetaan sosial partisipatif berbasis imersi langsung *(live-in)* di Kabupaten Sigi, yaitu Desa Lewara, Rejeki, Berdikari, Dombu, Bunga, Toro dan Olu. Pemetaan sosial ini dilakukan untuk memetakan struktur tata kelola formal, pranata hukum adat, serta kelembagaan pengelolaan sumber daya alam di tingkat tapak.

Hasil pemetaan menunjukkan bahwa keberhasilan intervensi di tapak bergantung pada konsolidasi tiga pilar institusional desa. Pertama, institusi formal pemerintah desa yang memegang kewenangan legalisasi Peraturan Desa (Perdes) Tata Ruang Hijau dan penegasan batas wilayah. Kedua, lembaga adat yang memegang legitimasi hukum lokal. Salah satu contohnya adalah melalui penerapan sanksi adat *(Givu)*, struktur tradisional ini menjadi garda depan dalam menyelesaikan konflik warga termasuk sengketa lahan. Ketiga, pranata ekonomi dan kelompok kerja komunal, mulai dari kelompok kerja tani tetap *(Mapalus)* di Desa Olu hingga unit Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Temuan-temuan kelembagaan ini menjadi dasar bagi LTKL dan mitra untuk menyelaraskan dokumen RPJMDes dengan Roadmap Sigi Hijau, sekaligus memperkuat kapasitas manajerial Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dalam hilirisasi komoditas bernilai tambah non-deforestasi secara akuntabel.

Di Kabupaten Sanggau, Lembaga Pemberdayaan Gerakan Rakyat (ELPAGAR) juga melakukan pemetaan dinamika sosial dan komunitas yang komprehensif di Hutan Adat Tae. Hasil analisis mengidentifikasi adanya penyempitan ruang kelola masyarakat yang menyebabkan kerentanan tenurial khususnya antara wilayah desa, adat dan korporasi. Rekomendasi strategis dari kajian ini akan menjadi rujukan utama untuk memastikan intervensi yang didorong akan memperkuat perlindungan hak kelola berbasis modal sosial masyarakat setempat.





B. Mengukur Penerimaan Masyarakat terhadap Ekonomi Restoratif di Sigi dan Siak

Dari pandangan LTKL yang melihat permasalahan dari kacamata sistem, keberhasilan pemulihan lingkungan tidak cukup hanya dengan modal pendanaan atau izin pemda. Inisiatif hijau perlu menyentuh nilai budaya dan kepercayaan masyarakat terhadap inisiatif tersebut agar warga tidak mudah kembali ke pola lama yang merusak alam. Untuk itu, Perkumpulan PRAKARSA melakukan kajian menggunakan *Social License to Restore (SLR)*[12] untuk mengukur derajat penerimaan dan kepemilikan masyarakat terhadap inisiatif ekonomi restoratif di Kabupaten Sigi dan Siak. Riset berbasis 90 wawancara mendalam ini memetakan spektrum adopsi warga dari penerimaan pasif hingga identifikasi psikologis penuh.

Di Sigi, perlindungan Hutan Purba Ranjuri mencapai level kepemilikan kolektif tertinggi *(psychological identification)* karena terintegrasi dengan kearifan adat dan peran vitalnya dalam menyediakan air bersih pasca bencana likuifaksi 2018. Sementara di Siak, integrasi nelayan rawa dan BUMDes ke dalam struktur wirausaha lestari (ASL dan Pinaloka) berhasil meraih persetujuan aktif *(approval)* di bawah payung Perda Siak Hijau.

Namun, kajian ini turut menggarisbawahi tantangan persistensi ekonomi: ketika kepastian pasar komoditas lestari belum mapan, potensi peralihan kembali ke tanaman monokultur seperti sawit di Siak dan jagung di Sigi tetap menjadi risiko nyata yang membutuhkan pendampingan jangka panjang.



[12] *Adaptasi dari kerangka Social License to Operate (SLO) oleh Thomson & Boutilier (2011) yang berarti tingkat penerimaan/legitimasi masyarakat terhadap operasional industri tambang/perkebunan, yang kemudian disesuaikan untuk konteks intervensi restorasi ekosistem.*

C. Gerakan Berbasis Budaya: Mengaktivasi Memori Kolektif dan Narasi Lokal

Pelestarian alam dan mitigasi bencana tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan aturan hukum maupun proyek teknis, namun perlu digerakkan lewat memori kolektif serta budaya lokal seperti yang dilakukan di beberapa kabupaten anggota LTKL. Di Kalimantan Barat, inisiatif Nusi Ari Kapuas mengonsolidasikan gerakan kolektif pemuda, pegiat budaya, dan sanggar seni di Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu guna mengampanyekan penyelamatan ekosistem Sungai Kapuas melalui karya seni mural, musikalisasi puisi, serta pengarsipan teknik tenun pewarna alami dan perladangan surut air.

Di Sulawesi Tengah, riset Kamus Toponimi PASIGALA merekonstruksi sejarah kebencanaan melalui penelusuran nama-nama tempat tradisional berbahasa Kaili[13]. Riset bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), lembaga adat, dan akademisi ini membuktikan bahwa toponimi asli seperti *Tagari Londjo* (“tanah yang terbenam”) dan *Biromaru* (“rawa alang-alang membusuk”) berfungsi sebagai sistem peringatan dini berbasis kearifan tutur, yang menegaskan pentingnya memori lokal dalam perencanaan ruang tahan bencana. Selain itu, komunitas di Sigi menggalang gerakan bersama melalui Gampiri. Terinspirasi dari kearifan lumbung pangan, inisiatif ini mewujudkan ruang komunal *(communal space)* yang ramah lingkungan dengan memanfaatkan material alami serta limbah, seperti batubata berbahan kotoran sapi dan kelapa.

Sementara itu di Siak, platform media komunitas Explore Siak mengintegrasikan pilar Alam, Sejarah, Inovasi, dan Kolaborasi (ASIK). Inisiatif ini mendokumentasikan arsip kota secara digital, memfasilitasi temu komunitas berkala, serta mengamplifikasi promosi produk UMKM hijau guna menumbuhkan kesadaran kolektif generasi muda dalam menjaga ekosistem gambut.







Untuk video pembuatan bata kotoran hewan yang digunakan di *Communal Space* dapat dilihat pada kode QR di atas

[13] *Suku Kaili adalah suku bangsa di Indonesia yang mendiami sebagian besar dari Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya wilayah Kabupaten Donggala, Kabupaten Sigi, dan Kota Palu.*

Ruang Tumbuh dan Akuntabilitas Sekretariat



Transformasi Peran Sekretariat

Dari Pengelola Program Menjadi Pendorong Sistem

Seiring dengan evolusi gerakan Kabupaten Lestari, Sekretariat LTKL mempertegas pergeseran perannya dari sekadar pengelola program menjadi fasilitator sistem *(system enabler)*. Transformasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa daya dorong perubahan benar-benar dimiliki dan digerakkan oleh para pemangku kepentingan di daerah. Dalam kerangka baru ini, Sekretariat LTKL menjalankan tiga peran kunci:

Pertama, sebagai *Process Builder*, Sekretariat bertugas mengawal kualitas proses kolaborasi multipihak agar tetap inklusif dan adil. Peran ini berfokus pada pendistribusian peran secara proporsional, memastikan suara aktor lokal—termasuk kelompok orang muda dan masyarakat di tapak—terdengar serta diakomodasi dalam pengambilan keputusan. Fungsi Sekretariat bukan mendikte arah program, melainkan menjaga agar setiap komitmen bersama dapat dieksekusi dan dimiliki penuh oleh daerah.

Kedua, sebagai *Knowledge Initiator,* Sekretariat berfungsi sebagai akselerator peningkatan kapasitas dengan membantu daerah memahami dinamika dan cara kerja sistem secara mendalam. Pembelajaran, potensi, dan praktik baik yang lahir dari tapak dikelola menjadi pengetahuan yang dapat diadopsi secara berkelanjutan.

Ketiga, sebagai *Network Builder,* Sekretariat fokus memperluas dan memperkaya jejaring mitra strategis untuk terhubung langsung dengan kabupaten. Melalui kemitraan yang setara, peran ini memastikan daerah mendapatkan akses sumber daya dan kolaborasi yang dibutuhkan untuk mencapai misi Kabupaten Lestari.



Menjalankan peran sebagai *system enabler* selama tiga tahun terakhir, Sekretariat LTKL berfokus mendorong pergeseran pola pikir *(mindset)* di tingkat tapak. Intervensi ini diwujudkan melalui 22 sesi penguatan kapasitas dan kepemimpinan yang menjangkau 20 organisasi—mulai dari mitra pendamping komunitas, forum multipihak, OMS, hingga sentra bisnis—serta membina 19 pemimpin lokal di kabupaten anggota.

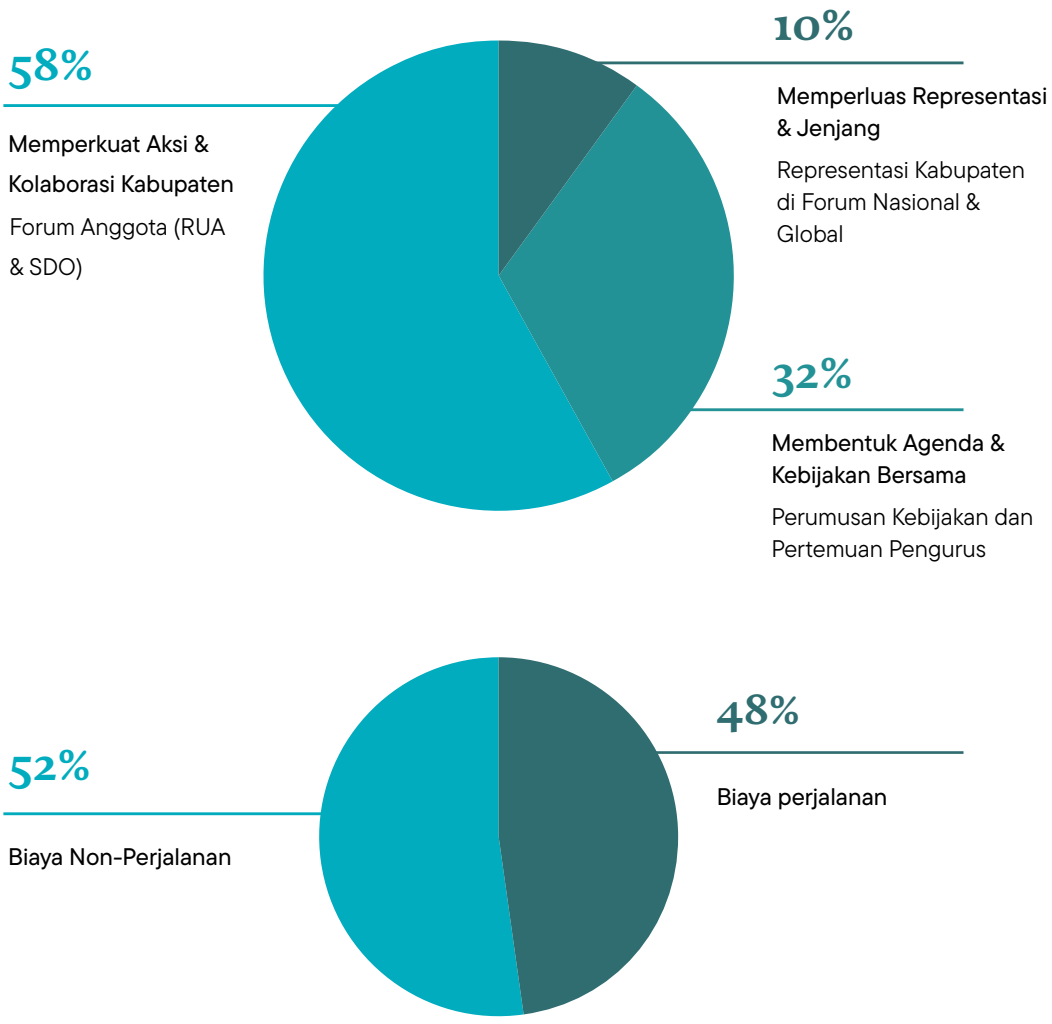




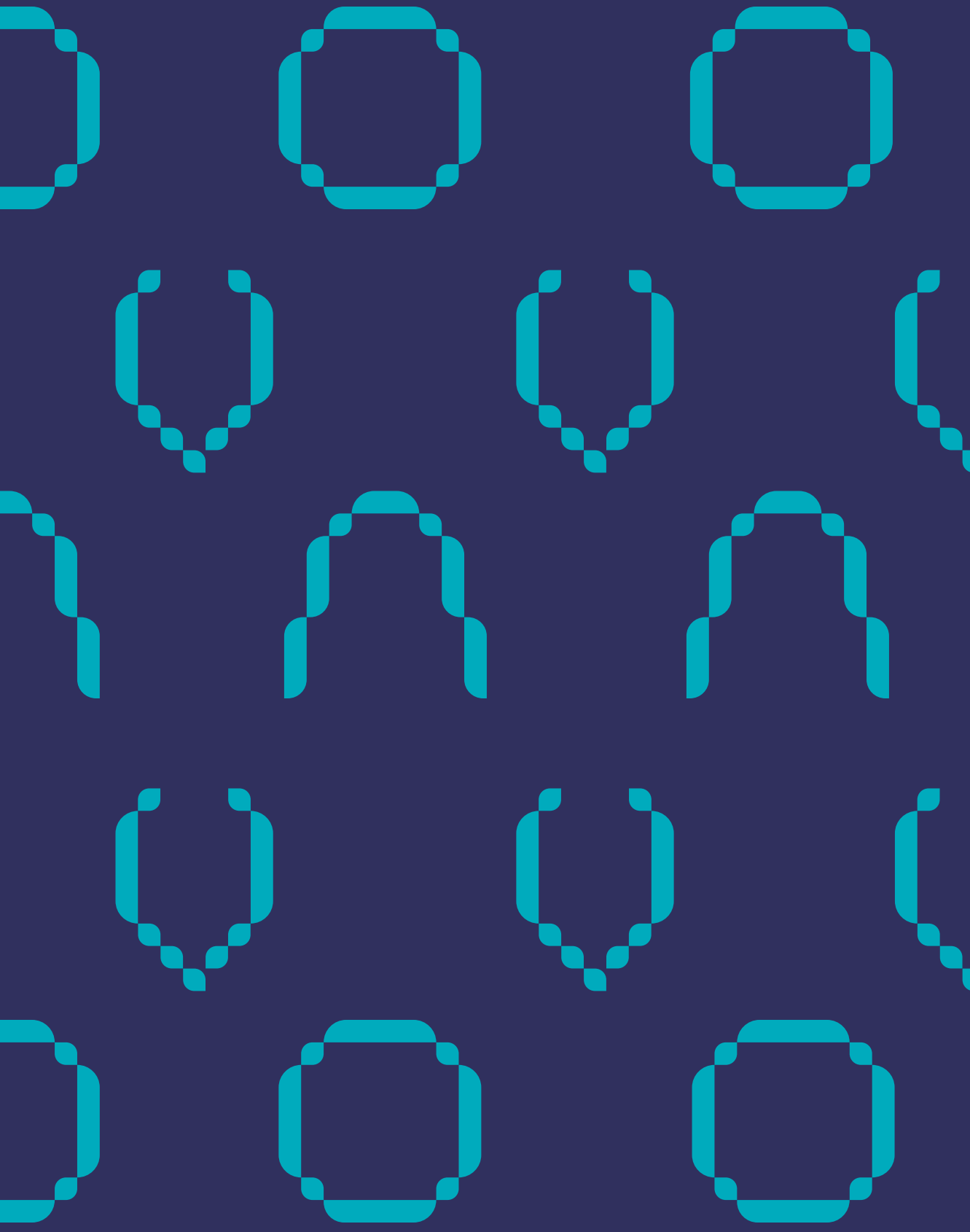
Sebagai asosiasi pemerintah kabupaten, terdapat dana iuran keanggotaan LTKL yang digunakan untuk kemajuan kabupaten. Dana digunakan dengan rincian sebagai berikut:

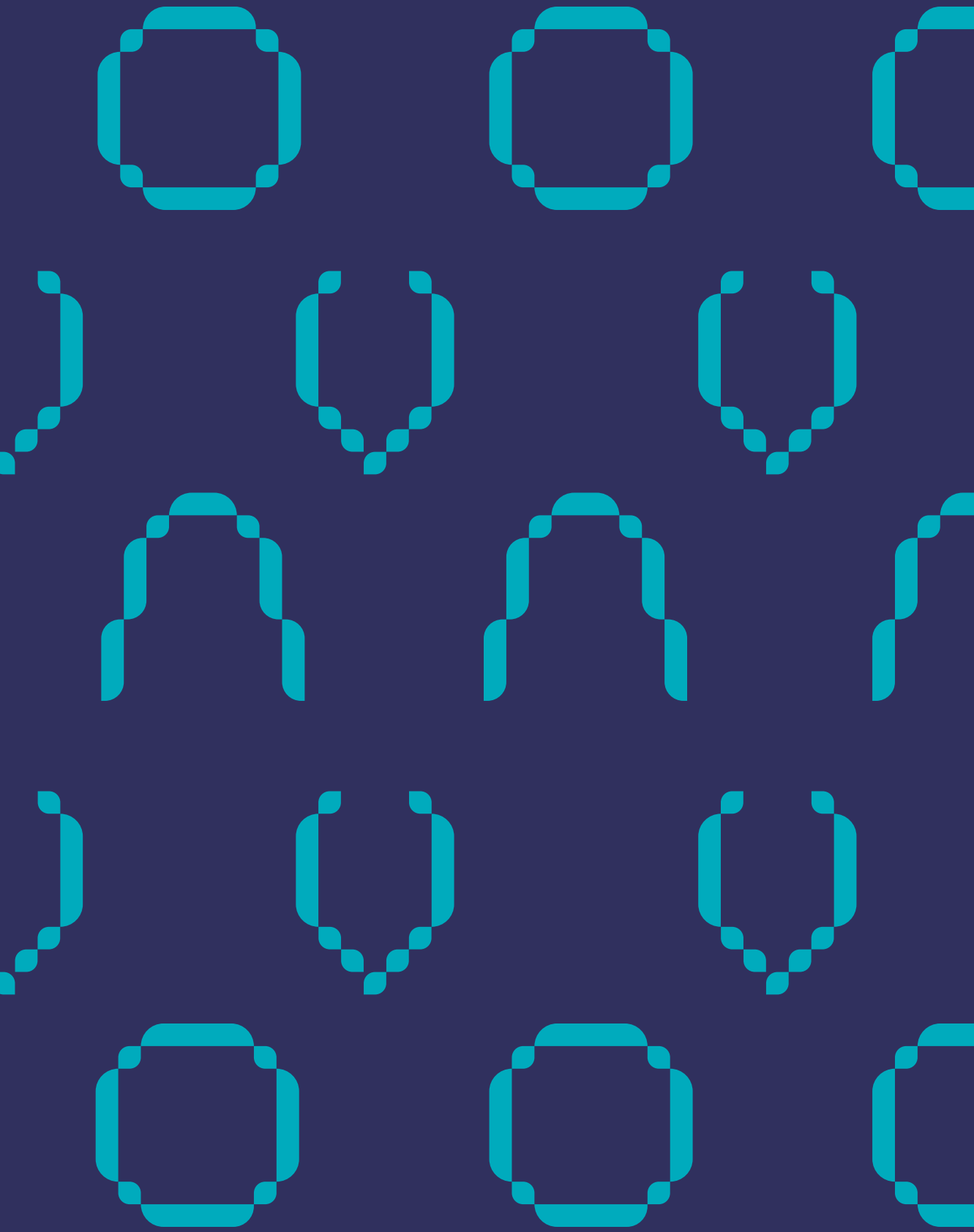
Penggunaan Dana Iuran Kabupaten Anggota LTKL

Periode Agustus 2023 - Juli 2026



Sepanjang 2023-2026 LTKL dapat menjalankan program dan aktivitasnya berkat dukungan dari berbagai donor, seperti: Climate and Land Use Alliance (CLUA), Ford Foundation, SKOLL Foundation, Co-Impact, dan Viriya ENB





LTKL LINGKAR TEMU KABUPATEN LESTARI

Sekretariat Lingkar Temu Kabupaten Lestari
Graha Tirtadi Lantai 3 No.308
Jl. Pangeran Antasari No.18A
Cipete Selatan, Jakarta Selatan 12410

www.kabupatenlestari.org

kabupatenlestari
Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL)